ANALISIS KINERJA DISENTRALISASI FISKAL TERHADAP IPM PADA KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Program Studi Ekonomi Pembangunan

OLEH :

Nama : Diva Andini Lubis

Npm : 2105180025

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt.Muchtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 25 Juli 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

NAMA	**: DIVA ANDINI LUBIS**
N P M	**: 2105180025**
PROGRAM STUDI	**: EKONOMI PEMBANGUNAN**
JUDUL TUGAS AKHIR	**:ANALISIS KINERJA DISENTRALISASI FISKAL TERHADAP IPM PADA KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

DINYATAKAN : (A) ***Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara***

Tim Penguji

Penguji I

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si.

Penguji II

HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si.

a/n Pembimbing

Dr. RITA HANDAYANI, S.E., M.Si.

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap	**: DIVA ANDINI LUBIS**
N.P.M	**: 2105180025**
Program Studi	**: EKONOMI PEMBANGUNAN**
Alamat Rumah	**: JL. RIDWAN HUTAGALUNG NO. 24 PANDAN**
Judul Tugas Akhir	**: ANALISIS KINERJA DISENTRALISASI FISKAL TERHADAP IPM PADA KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Juli 2025

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. RITA HANDAYANI, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Pelaksana Harian Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si.

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : DIVA ANDINI LUBIS
N.P.M : 2105180025
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. RIDWAN HUTAGALUNG NO. 24 PANDAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KINERJA DISENTRALISASI FISKAL TERHADAP IPM PADA KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
18 Feb. 2025	Bab I, II, III Lengkap.		
26-5-2025	Bab IV → Analisis Data.		
13/6-2025	- Olah Data.		
2/7-2025	- Uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi - FGLS		
7/7-2025	- Analisis Data + artikel.		
9/7-2025	- Perbaiki Lengkap - Daftar pustaka - Lengkap		
17/7-2025	Acc Sidang Tugas akhir		

Medan, Juli 2025
Diketahui /Disetujui
Pelaksana Harian Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. RITA HANDAYANI, S.E., M.Si.

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Diva Andini Lubis
NPM	: 2105180055
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Judul	: Analisis Kinerja Disentralisasi Fiskal terhadap IPM pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan TUGAS AKHIR atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/Tugas Akhir.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
   - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
   - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/ Tugas Akhir dan penghunjukkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Februari 2025
Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
2FD69AMX156071034

Diva Andini Lubis

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan TUGAS AKHIR

ABSTRAK

Analisis Kinerja Disentralisasi Fiskal Terhadap IPM Pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Diva Andini Lubis

Ekonomi Pembangunan

Divaandini21@gmail.com

Penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 25 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023. Desentralisasi fiskal dianggap krusial untuk kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat, namun wilayah ini menghadapi tantangan seperti disparitas kemandirian fiskal dan peningkatan IPM yang lambat.Menggunakan model regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), studi ini menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara positif dan signifikan memengaruhi IPM. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa (DD) tidak menunjukkan pengaruh signifikan, menandakan pengelolaan yang belum optimal. Meskipun variabel fiskal secara simultan signifikan dan menjelaskan 90,3677% variasi IPM, kabupaten/kota di Sumatera Utara masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.Dengan demikian, disimpulkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan ini dan mendorong pembangunan yang lebih merata serta berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Disentralisasi Fiskal, DAU DAK DBH DD Indeks Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

Analysis of Fiscal Decentralization Performance on Human Development Index (HDI) in Regencies in North Sumatra Province

Diva Andini Lubis

Economic development

Divaandini21@gmail.com

This study examines the effect of fiscal decentralization performance on the Human Development Index (HDI) in 25 districts/cities in North Sumatra Province during the period 2019 to 2023. Fiscal decentralization is considered crucial for regional independence and community welfare, but this region faces challenges such as disparities in fiscal independence and slow HDI growth. Using a panel data regression model with a Fixed Effect Model (FEM) approach, this study found that the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) positively and significantly affect the HDI. In contrast, the Revenue Sharing Fund (DBH) and the Village Fund (DD) did not show a significant effect, indicating suboptimal management. Although fiscal variables are simultaneously significant and explain 90.3677% of the variation in the HDI, districts/cities in North Sumatra are still highly dependent on central government transfers. Thus, it is concluded that regional fiscal independence is still low. Therefore, increasing Regional Original Income (PAD) is very important to reduce this dependence and encourage more equitable and sustainable development in the region.

Keywords: Fiscal Decentralization, DAU DAK DBH DD Human Development Index.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *"* ***Analisis Kinerja Disentralisasi Fiskal Terhadap IPM Pada Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara*** *"*. Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah membantu dalam berbagai hal selama proses penyusunan ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan berkontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait desentralisasi fiskal. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **Assoc. Prof**. **Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si., CMA** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si,** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung SE., M.Si,** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si.,** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dra. Roswita Hafni, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu **Dr. Rita Handayani, S.E., M.Si** Selaku Dosen Pembimbing Tugas akhir yang telah memberikan dan arahan selama pelaksanaan penulisan tugas akhir ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
8. Ibu **Hastina Febriaty, S.E., M.Si** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan selama tugas akhir ini.
9. Diva Andini, ya! Diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan yang ada atau proses-proses lainnya, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat.

Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah SWT membalas susah payah yang telah bapak ibu berikan.

Medan, Februari 2025

Penulis

Diva Andini Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 15
1.3 BATASAN MASALAH 15
1.4 RUMUSAN MASALAH 15
1.5 TUJUAN PENELITIAN 16
1.6 MANFAAT 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
2.1 KAJIAN TEORI 17
2.1.1 Pembangunan Ekonomi 17
2.1.2 Index Pembangunan Manusia 19
2.1.3 Keuangan Negara 20
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi 23
2.1.5 Desentralisasi Fiskal 26
2.2 PENELITIAN TERDAHULU 33
2.3 KERANGKA ANALISIS 38
2.4 HIPOTESIS 38
BAB III METODE PENELITIAN **39**
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN 39
3.2 DEFINISI OPERASIONAL 39
3.3 KERANGKA KONSEP 40
3.4 JENIS DAN SUMBER DATA 40
3.5 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 41
3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 41

3.7 TEKNIK ANALISIS 42
3.7.1 Analisis Ekonomi Deskriftif Desentralisasi Fiskal 25 kabupaten 42
3.7.2 Analisa Model Ekonometrika 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 52
4.1 Gambaran Umum Pulau Sumatera 52
4.1.1 Kondisi Geografis 52
4.1.2 Kondisi Topografi 53
4.1.3 Luas Wilayah 54
4.2 Transfer Dana Sumatera Utara 55
4.2.1 Dana Alokasi Umum 55
4.2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) 58
4.2.3 Dana Bagi Hasil 60
4.2.4 Dana Desa 63
4.2.5 Index Pembangunan Manusia 65
4.3 Hasil Analisis Ekonometrika 66
4.3.1 Uji Chow 67
4.3.3 Uji Multikolenialitas 70
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 71
4.3.5 Hasil Uji Hipotesis 75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 81
A. KESIMPULAN 81
B.SARAN 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

Tabel 11 Index Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara 3
Tabel 2 Tabel Realisasi APBN Sumatera Utara (Transfer Daerah Hingga Dana Insentif Fiskal) 7
Tabel 3 Penelitian Terdahulu 33
Tabel 4 Definisi Operasional 39
Tabel 5 Rincian Dana Alokasi Umum 25 Kab.Sumut (Satuan Miliyar)..... 55
Tabel 6 5 Peringkat Kabupaten Tertinggi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023-2024 (Satuan Miliyar)..... 56
Tabel 7 Rincian Dana Alokasi Khusus Kab.Sumut (Satuan Miliyar)..... 58
Tabel 8 5 Peringkat Kabupaten Tertinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2023-2024 (Satuan Miliyar) 59
Tabel 9 Rincian Dana Bagi Hasil Kab.Sumut pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara (Satuan Miliyar) 60
Tabel 10 5 Peringkat Kabupaten Tertinggi Dana Bagi Hasil (DBH) pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2023-2024 (Satuan Miliyar) 61
Tabel 11 Rincian Dana Desa Di Kab.Sumut pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara (Satuan Miliyar) 63
Tabel 12 5 Peringkat Kabupaten Tertinggi Dana Desa (DD) pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2023-2024 (Satuan Miliyar)..... 64
Tabel 13 Index Pembangunan Manusia 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Realisasi Belanja Daerah Sumatera Utara 10
Gambar 2 Kerangka Analisis 38
Gambar 3 Kerangka Konsep Model Estimasi 40
Gambar 4 Hasil Etimasi Uji Chow 67
Gambar 5 Hasil Etimasi Uji Hausman 68
Gambar 6 Hasil Fixed Effect 69
Gambar 7 Uji Multikolenialitas 70
Gambar 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 72
Gambar 9 Hasil Uji t 75
Gambar 10 Hasil Uji F 77
Gambar 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desentralisasi fiskal merupakan proses distribusi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Menurut *(Saragih, 2003)*, desentralisasi fiskal adalah proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah.

Teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Namun, efektivitas desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efisien dan transparan. Menurut *(Bahl, 2001)*, instrumen fiskal yang biasa digunakan dalam desentralisasi fiskal meliputi pengaturan pajak lokal, pembagian pajak, dan bantuan khusus. Oleh karena itu, analisis pengelolaan anggaran terhadap kinerja desentralisasi fiskal di 25 Kabupaten Provinsi Sumatera Utara selama periode *2019-2023* akan memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan IPM.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur yang sangat berarti dalam kajian ekonomi makro, dalam pandangan yang luas pertumbuhan ekonomi menandakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menciptakan perubahan dalam

struktur social masyarakat yang dapat menciptakan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Widiaty & Nugroho, 2020). Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada masyarakatnya, kemampuan ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan keharusan dalam peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan pembangunan ekonomi .Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena dengan diadakannya otonomi daerah maka pemerintah dapat leluasa untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali

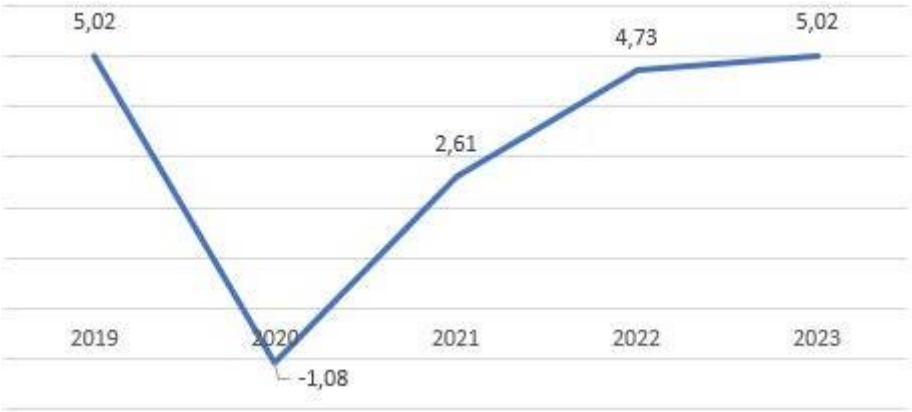

potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

Sumber: bps.go.id

Ekonomi Sumatera Utara menunjukkan tren pemulihan yang positif sejak tahun *2021*. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tumbuh positif di tahun *2023*. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah perlu terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut agar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dapat terus berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tidak merata. Beberapa daerah, seperti Medan dan Deli Serdang, tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lain. Masih terdapat kesenjangan pendapatan yang tinggi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Ekonomi Sumatera Utara masih bergantung pada sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur di daerah-daerah tertinggal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan daya saing masyarakat serta mendiversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor sekunder dan tersier.

Provinsi yang memiliki ibu kota di Medan ini juga memiliki berbagai macam destinasi wisata alam yang mampu menggenjot perekonomian dalam sektor pariwisata salah satunya adalah Danau Toba. Data BPS Daerah Provinsi Sumatera Utara pada *2018* menunjukkan sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian seperti perkebunan cokelat, karet, kopi, kelapa sawit, dan kelapa sebagai penopang utama perekonomian. Kontribusinya mencapai 21% dari total PDRB

Tabel 11 Index Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara

1 Index Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara

TAHUN	TINGKAT IPM

2019	71,74
2020	71,77
2021	72,00
2022	72,71
2023	73,37

Sumber : bps.go.id

Pembangunan manusia menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komprehensif yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dalam konteks pembangunan di Sumatera Utara, IPM menjadi tolok ukur utama untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Data IPM kabupaten/kota di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Rata-rata IPM Sumatera Utara meningkat dari 74,51 pada tahun 2022 menjadi 75,13 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan, meskipun masih terdapat disparitas yang signifikan antarwilayah. Misalnya, Kabupaten Nias memiliki IPM terendah, yaitu 65,15 pada tahun 2023, sementara Kota Medan memiliki IPM tertinggi sebesar 82,61. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan manusia di Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada peningkatan angka IPM secara keseluruhan tetapi juga pada pengurangan kesenjangan antar daerah.

Dalam Teori Pembangunan Manusia, menekankan bahwa pembangunan harus difokuskan pada peningkatan kemampuan individu dan kebebasan mereka untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Hal ini tercermin dalam data IPM Sumatera Utara, di mana peningkatan rata-rata IPM mencerminkan adanya upaya perbaikan pada dimensi pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh, Kota Medan dengan IPM 82,61 menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan akses pendidikan tinggi dan layanan kesehatan berkualitas, mendukung teori bahwa kebebasan dan kemampuan individu adalah inti dari pembangunan *(amarthya sen, 1999).*

Kesenjangan pembangunan antar daerah sering kali disebabkan oleh hubungan struktural yang tidak setara. Disparitas antara Kota Medan dan kabupaten seperti Nias (IPM 65,15) dapat dijelaskan dengan teori ini, di mana daerah perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan investasi. Hambatan infrastruktur di daerah tertinggal, seperti Nias Barat dengan IPM 64,68, mengindikasikan perlunya intervensi untuk mengatasi ketergantungan pada daerah yang lebih maju.

Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh *(Becker, 1936)* relevan dalam menjelaskan pentingnya investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan IPM. Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Simalungun, yang menunjukkan peningkatan konsisten pada IPM, mencerminkan hasil dari investasi pada sektor-sektor ini. Peningkatan di daerah ini mendukung gagasan bahwa modal manusia merupakan faktor kunci dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, peningkatan IPM di Sumatera Utara dari 2022 ke 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam indikator-indikator pembangunan manusia. Namun, jika dilihat secara lebih rinci, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian: Kabupaten Nias, Nias Barat, dan Nias Utara memiliki IPM di bawah 66 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan tantangan yang besar dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memadai di wilayah ini. Faktor geografis, infrastruktur yang kurang memadai, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi hambatan utama. Kota Medan, dengan IPM 82,61, mencerminkan keberhasilan pembangunan perkotaan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai, akses pendidikan tinggi, dan layanan kesehatan berkualitas. Namun, keberhasilan ini perlu diimbangi dengan upaya untuk mendistribusikan manfaat pembangunan ke wilayah lain di Sumatera Utara. Kabupaten seperti Labuhan Batu Utara dan Simalungun menunjukkan peningkatan IPM yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pembangunan yang efektif dan berkesinambungan, termasuk dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Daerah seperti Nias dan Nias Barat memerlukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur dasar. Penyediaan jalan, listrik, dan internet dapat membuka akses lebih besar terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Daerah dengan IPM rendah membutuhkan program intervensi yang terfokus, seperti beasiswa pendidikan untuk anak-anak di wilayah tertinggal dan program kesehatan untuk ibu dan anak. Program ini dapat membantu meningkatkan indikator pendidikan dan kesehatan di daerah seperti Nias Utara dan Pakpak Bharat. Peningkatan IPM tidak hanya

menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat menciptakan program-program pembangunan yang lebih inklusif, terutama di daerah tertinggal. Penggunaan data IPM kabupaten/kota sebagai dasar pengambilan kebijakan memungkinkan perencanaan yang lebih akurat. Pemerintah dapat memetakan kebutuhan spesifik setiap wilayah dan merancang intervensi yang lebih efektif.

Tabel 2 Tabel Realisasi APBN Sumatera Utara (Transfer Daerah Hingga Dana Insentif Fiskal)

Tabel Realisasi APBN Sumatera Utara (Transfer Daerah Hingga Dana Insentif Fiskal)

Jenis Apbn	**2021 Realisasi (%)**	**2022 Realisasi (%)**	**2023 Realisasi (%)**
Transfer ke Daerah	41,152,90 (98,57)	42,490,91 (93,92)	42,490,91 (93,92)
Dana Transfer Umum	25,306,04 (99,26)	25,408,27 (99,32)	25,408,27 (99,32)
Dana Alokasi Khusus Fisik	3,525,96 (68,27)	3,704,75 (77,29)	3,704,75 (77,29)
Dana Alokasi Khusus Non-Fisik	5,248,50 (99,85)	4,895,79 (94,82)	4,895,79 (94,82)
Dana Desa	3,706,98 (98,44)	3,678,68 (99,84)	3,678,68 (99,84)
Dana Insentif	365,42 (80,43)	403,76 (81,00)	403,76 (81,00)

Fiskal

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistika

Realisasi Transfer ke Daerah menunjukkan tren penurunan dari 98,57% pada tahun 2021 menjadi 93,92% pada tahun 2022 dan tetap stagnan pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penyerapan anggaran. realisasi anggaran yang rendah dapat disebabkan oleh masalah administrasi, kapasitas pemerintah daerah, atau kendala birokrasi. Hal ini juga berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.

Dana Transfer Umum mencatat tingkat realisasi yang konsisten tinggi, yaitu di atas 99%, dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,68%. Dalam teori Fiscal Decentralization, alokasi dana ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam pembiayaan kebutuhan lokal. Tingkat realisasi yang stabil menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana ini. Namun, stagnasi dan pertumbuhan negatif mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan dana dalam menciptakan dampak pembangunan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menunjukkan tingkat realisasi yang jauh lebih rendah dibandingkan komponen lainnya, yaitu 68,27% pada 2021 dan 77,29% pada 2022-2023, dengan pertumbuhan negatif sebesar -5,67%. Menurut Agency Theory, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta rendahnya kapasitas pelaksanaan proyek

infrastruktur fisik. Efisiensi penggunaan DAK Fisik perlu ditingkatkan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah.

Dana Desa memiliki tingkat realisasi tinggi, yaitu 98,44% (2021) dan 99,84% (2022-2023), tetapi pertumbuhan mengalami penurunan -0,76%. Dalam perspektif Community-Based Development, penggunaan dana desa yang tinggi menunjukkan bahwa desa memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, pertumbuhan negatif ini menunjukkan bahwa dana tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, sehingga evaluasi program yang dibiayai perlu dilakukan untuk memastikan dampaknya lebih optimal.

Dana Insentif Fiskal memiliki tingkat realisasi yang cenderung rendah (80,43% pada 2021 dan 81,00% pada 2022-2023) dengan pertumbuhan negatif -1,25%. Menurut teori Performance-Based Budgeting, dana ini seharusnya mendorong peningkatan kinerja daerah melalui pemberian insentif. Namun, rendahnya realisasi mengindikasikan bahwa mekanisme pemberian insentif atau implementasinya di daerah belum berjalan secara optimal. Perlu evaluasi terhadap indikator kinerja yang digunakan serta peningkatan kapasitas teknis daerah dalam memanfaatkan dana tersebut.

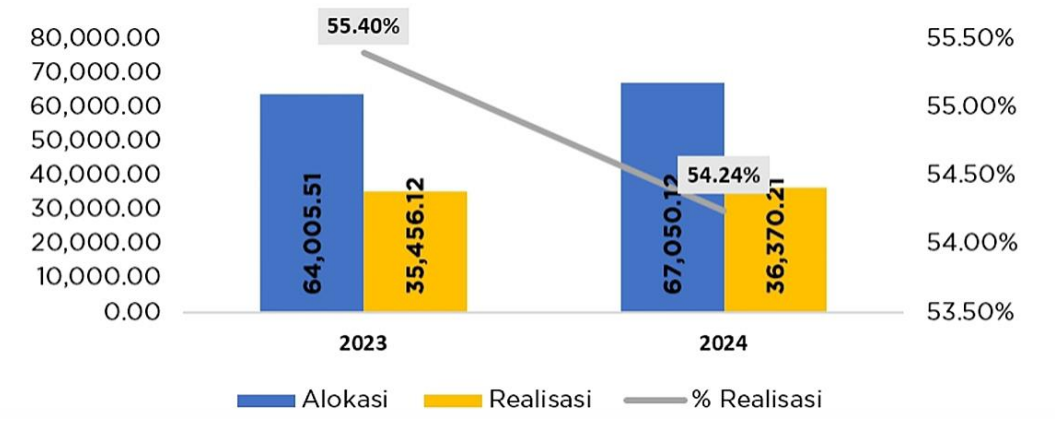

Gambar 1 Realisasi Belanja Daerah Sumatera Utara

Sumber :djkn kanwil sumatera utara

Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan sebesar 64.005,51 dengan realisasi 35.456,12, atau sekitar 55,40%. Sementara itu, pada tahun 2024, alokasi meningkat menjadi 67.050,12, tetapi realisasinya hanya 36.370,21, dengan persentase penyerapan yang sedikit menurun menjadi 54,24%. Penurunan tingkat realisasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Permasalahan utama yang sering terjadi dalam realisasi belanja daerah adalah rendahnya kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Sumatera Utara masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai sebagian besar belanjanya. Ketergantungan ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menutupi kebutuhan belanja secara mandiri. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta lemahnya daya tarik investasi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, rendahnya realisasi belanja juga bisa disebabkan oleh faktor birokrasi, perencanaan yang kurang matang, serta kendala teknis dalam pelaksanaan program. Hambatan administratif, seperti lambatnya proses lelang proyek atau ketidaksesuaian regulasi, sering kali menyebabkan serapan anggaran tidak optimal. Ketidakefisienan dalam penyerapan anggaran ini berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan proses distribusi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. *(Saragih, 2003)* mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai upaya distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan lebih tinggi ke tingkat pemerintahan lebih rendah. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, mendorong kemandirian fiskal, serta mempercepat pembangunan daerah. Namun, implementasi desentralisasi fiskal kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti pengelolaan anggaran yang kurang optimal, kapasitas fiskal daerah yang rendah, dan ketimpangan alokasi sumber daya keuangan antar daerah.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki 25 kabupaten/kota dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi beragam. Di provinsi ini, pengelolaan anggaran daerah memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kegiatan ekonomi Sumatera Utara berkontribusi

hampir 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2019, menjadikannya salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global dan ketergantungan pada sektor sumber daya alam.

Menurut teori federalisme fiskal, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran *(Bahl, 2001).* Teori ini juga menyatakan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efisien dan transparan. Dalam hal ini, instrumen fiskal seperti pengaturan pajak lokal, pembagian pajak, dan bantuan khusus menjadi elemen penting dalam mendukung desentralisasi fiskal.

Namun, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pertama, terdapat ketimpangan kemandirian fiskal antar daerah di Sumatera Utara. Kota Medan, misalnya, memiliki pendapatan per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain seperti Binjai, Tebing Tinggi, dan Padang Sidempuan. Ketimpangan ini mencerminkan distribusi manfaat dari desentralisasi fiskal yang belum merata, di mana sebagian besar kota masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kedua, fluktuasi signifikan dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) selama periode 2019–2023 berdampak pada stabilitas perencanaan pembangunan daerah. Penurunan tajam dalam transfer dana pada tahun-tahun

tertentu, seperti yang terjadi pada 2016, dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ketiga, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara mengalami peningkatan selama periode tersebut, kecepatan peningkatannya relatif lambat dan cenderung stagnan pada beberapa tahun awal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di seluruh wilayah provinsi. Keempat, ekonomi Sumatera Utara masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam, seperti perkebunan dan perikanan, serta pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut *(Widiaty & Nugroho, 2020)*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan perubahan struktur sosial masyarakat yang dapat menciptakan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui optimalisasi pengelolaan anggaran daerah. *(dinar & hasan, 2018)* menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan keharusan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemandirian fiskal Kabupatem di Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam menghadapi ketimpangan antara Kabupaten lainnya,

Menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam. Diversifikasi ekonomi tidak hanya meningkatkan kontribusi PAD, tetapi juga membuka peluang baru

untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan *(Tambunan, 2014)*. Dalam konteks ini, menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *(Shah, 2007)*.

Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan IPM dan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana interaksi antara DAU, DAK, dan DBH dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengelola alokasi anggaran secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyusun strategi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan IPM dan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana interaksi antara DAU, DAK, dan DBH dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengalokasian dana yang lebih efektif dan efisien, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ketimpangan kemandirian fiskal antar daerah di Sumatera Utara, di mana sebagian besar kota masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, sementara Kota Medan memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi.
2. Fluktuasi alokasi DAU, DAK, dan DBH yang signifikan selama periode 2019–2023, yang memengaruhi stabilitas perencanaan pembangunan daerah.
3. Perlambatan peningkatan IPM dan ketergantungan ekonomi Sumatera Utara pada sektor sumber daya alam.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengelolaan anggaran terhadap kinerja desentralisasi fiskal di 25 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2014–2023. Fokus penelitian mencakup evaluasi alokasi DAU, DAK, DBH dan DD, serta dampaknya terhadap kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini membatasi pembahasan pada aspek ketimpangan fiskal, perlambatan IPM, dan diversifikasi ekonomi di wilayah Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemandirian fiskal di kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam mengatasi ketimpangan antar daerah?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU),Dana Alokasi Khusus (DAK),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Desa (DD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 25 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemandirian fiskal di 25 kabupaten di Sumatera Utara.
2. Menganalisis pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU),Dana Alokasi Khusus (DAK),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Desa (DD) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 25 kabupaten di Sumatera Utara.

1.6 Manfaat

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.
2. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengelola alokasi dana transfer agar lebih stabil dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Menyusun strategi yang dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Salah satu teori klasik yang cukup berpengaruh adalah Teori Tahapan Pertumbuhan Ekonomi yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow (1960). Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berlangsung melalui lima tahap, mulai dari tahap tradisional, pra-lepas landas, lepas landas, pematangan, hingga tahap konsumsi massal. Tahapan ini menggambarkan proses perubahan struktural yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri modern. Dengan adanya "tahap lepas landas," investasi besar-besaran serta akumulasi modal menjadi kunci untuk mendorong percepatan pertumbuhan.

Selain itu, terdapat pula Model Dual Sektor yang diperkenalkan oleh Arthur Lewis (1954). Teori Lewis menyatakan bahwa ekonomi suatu negara terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor tradisional yang berlebih tenaga kerja dan sektor modern yang padat modal. Dalam model ini, surplus tenaga kerja dari sektor tradisional akan dialihkan ke sektor modern yang lebih produktif. Proses transfer ini, jika didukung oleh investasi dan akumulasi modal, akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan nasional secara keseluruhan. Model ini memberikan gambaran tentang bagaimana ketidakseimbangan struktural dapat diatasi melalui mekanisme pasar yang adaptif.

Di sisi lain, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikembangkan oleh Robert Solow (1956) memberikan penekanan pada peran akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, peningkatan output per kapita ditentukan oleh tingkat investasi dan laju pertumbuhan teknologi. Meskipun model ini mengasumsikan bahwa teknologi merupakan variabel eksogen, hasilnya menunjukkan bahwa tanpa peningkatan efisiensi teknologi, akumulasi modal saja tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan jangka panjang.

Tidak hanya itu, kritik terhadap pendekatan modernisasi muncul dalam bentuk Teori Ketergantungan. Teori ini dikembangkan oleh beberapa pemikir seperti Andre Gunder Frank (1966) dan Theotonio Dos Santos (1970). Menurut teori ketergantungan, keterbelakangan ekonomi negara-negara berkembang bukan semata-mata disebabkan oleh faktor internal, melainkan juga karena struktur hubungan ekonomi global yang timpang. Negara-negara maju memanfaatkan negara-negara berkembang sebagai penyedia bahan mentah dan pasar bagi produk industri mereka, sehingga menyebabkan negara-negara berkembang tetap terjebak dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi global.

Selain teori-teori tersebut, muncul pula pendekatan-pendekatan strukturalis yang menekankan pada pentingnya peran institusi dan kebijakan pemerintah dalam mengarahkan pembangunan. Dalam konteks ini, Sadono Sukirno (2008) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kuantitatif seperti investasi dan akumulasi modal, melainkan juga oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi harus

diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, bukan semata-mata dari pertumbuhan output nasional.

Dalam dekade terakhir, muncul pula konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan banyak diadopsi oleh negara-negara maju maupun berkembang sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam. Meskipun tidak selalu dikaitkan dengan satu nama tokoh tertentu, pendekatan ini mendapat dukungan konseptual dari berbagai peneliti seperti Sachs (2005) yang mengaitkan pembangunan ekonomi dengan isu-isu lingkungan dan sosial.

2.1.2 Index Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM digunakan sebagai alat evaluasi kesejahteraan masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama: **kesehatan**, **pendidikan**, dan **standar hidup**. Indeks ini memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup penduduk di suatu daerah dan sering digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Dimensi **kesehatan** dalam IPM diukur berdasarkan angka **harapan hidup saat lahir**, yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan, gizi, serta kondisi lingkungan. Semakin tinggi harapan hidup, semakin baik pula kondisi kesehatan masyarakat suatu daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan

masyarakat meliputi akses terhadap layanan kesehatan, tingkat kematian bayi, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Dimensi **pendidikan** diukur melalui dua indikator utama, yaitu **rata-rata lama sekolah (RLS)** dan **harapan lama sekolah (HLS)**. RLS menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, sedangkan HLS menggambarkan perkiraan jumlah tahun yang akan ditempuh oleh anak-anak yang baru memasuki dunia pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi daerah tersebut.

Dimensi terakhir dalam IPM adalah **standar hidup**, yang diukur menggunakan **Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita** dalam standar daya beli. Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan daya beli terhadap kebutuhan dasar. Keseimbangan dalam ketiga dimensi ini sangat penting untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan layanan kesehatan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

2.1.3 Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan sistem yang mengatur seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang, serta segala kegiatan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan melakukan pengeluaran guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Regulasi keuangan negara, di sisi lain, adalah kumpulan aturan hukum yang mengarahkan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik agar dilaksanakan secara

tertib, transparan, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan negara dan regulasinya saling berkaitan erat sehingga mencerminkan penerapan teori keuangan publik dalam praktik pemerintahan.

Secara teoritis, kerangka pemikiran keuangan negara dapat dijelaskan melalui teori-teori public finance yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave. Dalam karya mereka yang berjudul *Keuangan Negara; Dalam Teori dan Praktek* (Musgrave & Musgrave, 1991), mereka menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi adalah untuk menyediakan barang publik, mendistribusikan pendapatan secara adil, dan mengatasi kegagalan pasar (market failures). Teori ini menegaskan bahwa negara harus aktif dalam pengelolaan keuangan melalui perpajakan, pengeluaran, dan mekanisme redistribusi untuk mencapai kesejahteraan umum. Dengan demikian, regulasi keuangan negara tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan anggaran, melainkan juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh melalui pajak dan sumber penerimaan lain digunakan untuk membiayai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, regulasi keuangan negara di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti asas tahunan, universalitas, kesatuan, spesialitas, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk mengarahkan pengelolaan

keuangan negara agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan untuk menjamin bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban anggaran berjalan secara sistematis dan transparan.

Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik* (Saidi, 2008/2011) menguraikan bahwa hukum keuangan negara merupakan aspek legalistik yang mengatur semua tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Menurutnya, pembagian peran antara Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer) dan kementerian/lembaga lain sebagai pengguna anggaran (Chief Operational Officer) merupakan implementasi dari prinsip check and balance yang sangat penting dalam regulasi keuangan negara. Pembagian peran ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan untuk memastikan bahwa penggunaan dana negara selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada legislatif serta masyarakat.

Regulasi keuangan negara juga mencakup pengaturan perpajakan. Menurut Rochmat Soemitro (2011), pajak merupakan iuran yang wajib dipenuhi oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Pajak ini berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Regulasi terkait pemungutan pajak, bea, cukai, dan retribusi harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak terjadi percampuran antara penerimaan dan pengeluaran negara, sesuai dengan asas universalitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, teori keuangan negara juga mengajarkan bahwa regulasi fiskal berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan fiskal yang terintegrasi seperti penganggaran, alokasi dana, dan pemeriksaan penggunaan anggaran negara dapat mengantisipasi fluktuasi ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave dan Musgrave (1991) bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal adalah salah satu mekanisme untuk mengatasi kegagalan pasar dan mendistribusikan pendapatan secara adil.

Dalam era modern, perkembangan teknologi dan munculnya uang elektronik juga menuntut adanya adaptasi dalam regulasi keuangan negara. Kebijakan pengelolaan keuangan harus mampu mengakomodasi inovasi teknologi agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi global tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, regulasi keuangan negara tidak hanya berfokus pada aspek tradisional seperti perpajakan dan pengeluaran, tetapi juga harus responsif terhadap perubahan zaman.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi sering kali diukur menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala lokal. Menurut *(Todaro, 2012)*, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berarti peningkatan pendapatan, tetapi juga transformasi struktural yang melibatkan sektor-sektor perekonomian seperti pertanian, industri, dan jasa.

Beberapa teori utama tentang pertumbuhan ekonomi yang relevan dengan pembahasan Sumatera Utara meliputi:

1. Teori Pertumbuhan Klasik *(Richard & peggy, 1989)*, Pertumbuhan ekonomi bergantung pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian dan perkebunan di Sumut, dapat menjadi faktor pendorong utama dalam teori ini.
2. Teori Pertumbuhan *Neo-Klasik (Solow, 1956)*, Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal fisik, kemajuan teknologi, dan tenaga kerja. Kemajuan teknologi dianggap sebagai motor utama pertumbuhan dalam jangka panjang. Ini relevan dengan upaya modernisasi sektor industri di Sumut, terutama di kawasan Medan dan Deli Serdang.
3. Teori Endogen *(Romer, 1990)* dalam teori ini, inovasi, pendidikan, dan investasi dalam sumber daya manusia menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Untuk Sumut, pengembangan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi hal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

1. Sumber Daya Alam: Sumut kaya akan sumber daya alam, termasuk kelapa sawit, karet, dan hasil tambang. Namun, pengelolaan yang kurang optimal sering kali menjadi kendala.

2. Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan Belawan dan Bandara Kualanamu, memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumut.
3. Kebijakan Fiskal dan Transfer Keuangan: Dana transfer dari pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), memengaruhi kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan.
4. Investasi: Investasi di sektor industri dan pariwisata, terutama di kawasan Danau Toba, menjadi pendorong pertumbuhan.

Berdasarkan data terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun-tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Perekonomian Sumut didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu pengekspor utama kelapa sawit, karet, dan kopi di Indonesia. Namun, ketimpangan antar daerah masih menjadi isu utama, di mana daerah perkotaan seperti Medan cenderung lebih maju dibandingkan daerah pedesaan.

1. Teori *Klasik*: Keterkaitan Sumut dengan teori ini dapat dilihat dari dominasi sektor primer seperti pertanian dan perkebunan. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDRB menunjukkan penurunan seiring dengan pergeseran ke sektor jasa dan perdagangan.
2. Teori *Neo-Klasik*: Kemajuan teknologi di sektor perkebunan dan infrastruktur di kawasan perkotaan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, disparitas wilayah mengindikasikan adanya kendala dalam distribusi modal dan teknologi.

3. Teori *Endogen*: Pengembangan sumber daya manusia di Sumut melalui pendidikan dan pelatihan masih memerlukan perhatian lebih, terutama untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di sektor industri dan jasa.

Meskipun memiliki banyak potensi, Sumut menghadapi beberapa tantangan seperti ketimpangan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor pariwisata (terutama Danau Toba sebagai destinasi super prioritas), dan pengembangan UMKM.

2.1.5 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah proses penyerahan sebagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut *(Musgrave, 1956)* dalam teori keuangan publik, desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Di Indonesia, desentralisasi fiskal merupakan bagian penting dari implementasi otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui oleh UU No. 23 Tahun 2014.

Secara konsep, desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola anggaran melalui sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat, seperti

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Beberapa teori mendukung pentingnya desentralisasi fiskal. Salah satu teori utama adalah Teor*i (Tiebout, 1956),* yang menyatakan bahwa dengan desentralisasi, masyarakat dapat "memilih" wilayah yang memberikan pelayanan publik terbaik sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, *(Oates, 1972)* dalam *Decentralization Theorem* menekankan bahwa desentralisasi memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan preferensi lokal, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien.

Di sisi lain, desentralisasi juga memiliki tantangan besar, seperti risiko ketimpangan fiskal antar daerah. Wilayah dengan PAD yang kecil atau bergantung pada transfer pusat sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, yang dapat memperbesar ketimpangan ekonomi antar daerah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan desentralisasi fiskal secara luas, dengan pembagian kewenangan fiskal di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah pusat menyediakan transfer keuangan melalui empat mekanisme utama: DAU, DAK, DBH, dan DD. DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, sementara DAK digunakan untuk mendanai proyek-proyek spesifik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Namun, meskipun transfer dana terus meningkat setiap tahun, efektivitasnya sering dipertanyakan. Beberapa daerah, seperti Sumatera Utara, masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan transfer

keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi.

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah melalui alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satu indikator keberhasilan desentralisasi adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan ketimpangan regional. Namun, di Sumatera Utara, ketimpangan antar kabupaten/kota masih terlihat. Daerah perkotaan seperti Medan memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang bergantung pada sektor primer.

Selain itu, efektivitas desentralisasi fiskal juga bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran, terutama pada dana alokasi khusus fisik, sering menjadi kendala utama dalam merealisasikan tujuan pembangunan daerah.

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Pertama, ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Banyak daerah yang belum mampu meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga mereka bergantung pada DAU dan DAK. Kedua, kurangnya kapasitas manajemen keuangan daerah menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan anggaran yang efektif. Ketiga, ketimpangan fiskal antar daerah masih sulit diatasi, terutama di daerah-daerah terpencil atau tertinggal.

Di Sumatera Utara, misalnya, daerah dengan basis ekonomi agraris sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola sumber daya alam secara optimal. Akibatnya, potensi ekonomi daerah tersebut belum tergarap secara

maksimal, sementara wilayah perkotaan lebih maju karena dukungan infrastruktur dan investasi.

Untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal, pemerintah perlu mengembangkan strategi yang terfokus pada beberapa hal, seperti:

1. Peningkatan PAD: Mendorong daerah untuk menggali potensi ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata dan UMKM.
2. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Melalui pelatihan dan pendidikan terkait manajemen keuangan publik.
3. Perbaikan Sistem Pengawasan: Meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana transfer melalui transparansi dan pelaporan yang efektif.
4. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pengelolaan anggaran.

2.1.2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu yang merupakan prioritas nasional. Menurut *(Shah, 2007)* dalam *A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers*, DAK berfungsi sebagai instrumen untuk mendanai kebutuhan pembangunan spesifik yang tidak dapat dibiayai oleh DAU atau PAD.

DAK dibagi menjadi dua kategori utama: fisik dan non-fisik. DAK fisik digunakan untuk mendanai infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pendidikan, sedangkan DAK non-fisik mendanai kegiatan operasional seperti pelayanan kesehatan. Dalam 10 tahun terakhir, DAK fisik sering digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Misalnya,

pembangunan jalan di kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas banyak didanai melalui DAK fisik.

Tantangan utama dalam pengelolaan DAK adalah rendahnya penyerapan anggaran, terutama untuk proyek-proyek fisik. Di Sumatera Utara, beberapa kabupaten sering mengalami penundaan realisasi DAK akibat masalah administrasi dan kurangnya kapasitas teknis. *(Musgrave, 1956)* menekankan pentingnya perencanaan yang baik untuk memastikan efektivitas penggunaan transfer seperti DAK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dari pendapatan yang berasal dari sumber daya alam (SDA) atau pajak tertentu. Teori ini didukung oleh *(Tiebout, 1956)* yang menekankan pentingnya redistribusi pendapatan untuk menciptakan keseimbangan antar daerah kaya dan miskin.

DBH memainkan peran penting dalam mendukung pendapatan daerah, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, atau perkebunan. Di Sumatera Utara, DBH perkebunan seperti kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, khususnya di kabupaten Langkat, Labuhan Batu, dan Asahan.

Tantangan dalam pengelolaan DBH adalah fluktuasi pendapatan yang bergantung pada harga komoditas global. Misalnya, penurunan harga kelapa sawit pada 2019 berdampak pada penurunan pendapatan DBH di beberapa kabupaten di Sumatera Utara. *(Bird et al., 2003)* dalam Intergovernmental Fiscal Transfers

menyarankan pentingnya diversifikasi ekonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada DBH.

2.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah yang bersifat umum dan bertujuan untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan pengeluarannya. DAU diberikan kepada semua daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) berdasarkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Menurut *(Musgrave, 1956)* dalam Theory of Public Finance, DAU merupakan instrumen transfer yang dirancang untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan memastikan pemerataan layanan publik.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi dasar hukum DAU. Alokasi DAU terdiri dari dua komponen utama, yaitu alokasi dasar (berdasarkan jumlah gaji pegawai) dan formula DAU, yang mempertimbangkan celah fiskal (*fiscal gap*) antara kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah.

Salah satu peran utama DAU adalah membantu daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran, termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data 10 tahun terakhir, DAU menyumbang lebih dari 60% dari total transfer ke daerah di Indonesia, menjadikannya elemen penting dalam sistem desentralisasi fiskal.

Di Sumatera Utara, DAU memainkan peran kunci dalam mendukung operasional pemerintahan daerah di kabupaten seperti Nias Selatan, Humbang Hasundutan, dan Padang Lawas, yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD)

relatif kecil. Sebagai contoh, pada tahun 2021, DAU yang dialokasikan ke Sumatera Utara mencapai lebih dari 25 triliun rupiah, menunjukkan perannya dalam menciptakan pemerataan fiskal.

Namun, efektivitas DAU sering dikritik karena daerah cenderung menggunakannya untuk pengeluaran rutin, seperti gaji pegawai, daripada untuk belanja produktif seperti infrastruktur dan pendidikan. *(Oates, 1972)* dalam fiscal federalism menekankan bahwa transfer fiskal seperti DAU harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan spesifik daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Tantangan utama dalam pengelolaan DAU adalah ketergantungan tinggi daerah pada transfer ini. Sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara, terutama yang tergolong daerah tertinggal, sangat mengandalkan DAU sebagai sumber pendanaan utama. Ketergantungan ini mengurangi insentif bagi daerah untuk menggali potensi PAD mereka. Misalnya, pada tahun 2022, sebagian besar kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan kontribusi PAD yang rendah terhadap total pendapatan daerah, dengan angka rata-rata di bawah 10%.

Efektivitas DAU juga terhambat oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran di beberapa daerah. *(Bird et al., 2003)* menyarankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa DAU digunakan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peran DAU, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran. Selain itu, reformasi kebijakan DAU perlu diarahkan untuk mendorong daerah lebih fokus

pada belanja produktif yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.4 Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD) adalah dana yang dialokasikan langsung ke desa untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.*(Rondinelli, 1983)* menjelaskan bahwa transfer keuangan langsung seperti DD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lokal dan memberdayakan masyarakat secara langsung.

Sejak diluncurkan pada 2015 melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, DD telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan jalan desa, fasilitas air bersih, dan posyandu. Di Sumatera Utara, DD menjadi salah satu sumber utama untuk mengurangi kemiskinan di desa-desa terpencil, seperti di Nias dan Humbang Hasundutan.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan DD adalah penyalahgunaan anggaran dan rendahnya kapasitas aparatur desa. Dalam 10 tahun terakhir, beberapa kasus korupsi Dana Desa di Sumatera Utara mencerminkan kurangnya pengawasan yang efektif. keberhasilan transfer fiskal seperti DD sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

Nama, Judul Penelitian	Masalah Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
(Imam Sumardjoko, 2019).Penguatan kinerja keuangan	Kinerja keuangan daerah wilayah kepulauan dan	Kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan,	Fixed Effect Model (OLS)	Efektivitas pendapatan dan desentralisasi fiskal

daerah wilayah kepulauan dan implikasinya terhadap perubahan fundamental ekonomi regional.	dampaknya terhadap ekonomi	desentralisasi		berpengaruh positif; kemandirian dan ketergantungan keuangan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
(Rita handayani, 2024). Implikasi DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Pasca Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara.	Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM	DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi, IPM	Panel Vector Error Correction Model	DAU memiliki hubungan positif jangka pendek; DAK dan DBH negatif di jangka pendek tetapi positif dalam jangka panjang.
(Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia.	Problematika regulasi dan implementasi desentralisasi fiskal	Desentralisasi fiskal, otonomi daerah	Yuridis normatif, kualitatif	Desentralisasi fiskal penting untuk otonomi daerah namun belum ada regulasi lex specialis, terdapat potensi positif dan kendala implementasi.
*(Khamdana, 2016),*Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.	Pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan	Desentralisasi fiskal, investasi, pertumbuhan ekonomi	Path Analysis	Desentralisasi fiskal signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sementara investasi tidak

	kemiskinan			signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
(Esa Putra, 2022),Analisis desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara..	Sejauh mana desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, dan belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi	Desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, belanja modal	Fixed Effect Model	Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; ketergantungan transfer dan belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.
(*Trikurniasih et al., 2019),*Analisis kinerja keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara.	Kemampuan keuangan kabupaten/kota pemekaran dari aspek PAD	PAD, Dana Perimbangan, Otonomi Fiskal	Analisis kuadran	Kinerja PAD meningkat di semua kabupaten/kota pemekaran, namun ketergantungan terhadap Dana Perimbangan masih tinggi.
(*Affandi Rahman Halim,Artika Taryani, 2023*) "Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur"	Menganalisis dampak program dana desa sebagai kebijakan strategis untuk mengembangkan wilayah perdesaan, dengan fokus pada pengaruh dimensi kinerja pengelolaan dana desa terhadap Indeks	Persentase penyaluran dana, Persentase penyerapan dana, Kecepatan penyaluran dana	Analisis regresi data panel dengan model efek tetap.	Persentase penyaluran dana tidak secara signifikan memengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM). Persentase penyerapan dana dan kecepatan penyaluran dana, dengan jeda waktu dua dan tiga tahun, memiliki pengaruh

	Desa Membangun (IDM).			signifikan terhadap IDM.Dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan perdesaan baru akan terlihat dalam dua hingga tiga tahun setelah penyaluran dana dilakukan.
(Fika Dista Wulansari, 2019) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah"	Menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	•Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) , dan Dana Bagi Hasil (DBH). • Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Penelitian ini menggunakan metode sensus. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 20.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia.
(Sulastri & Efendri, 2021) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	• Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi	metode kuantitatif dengan analisis statistik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)"	pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan.	Hasil (DBH). • Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap IPM.

Sumber: Diolah Penulis 2025

2.3 Kerangka Analisis

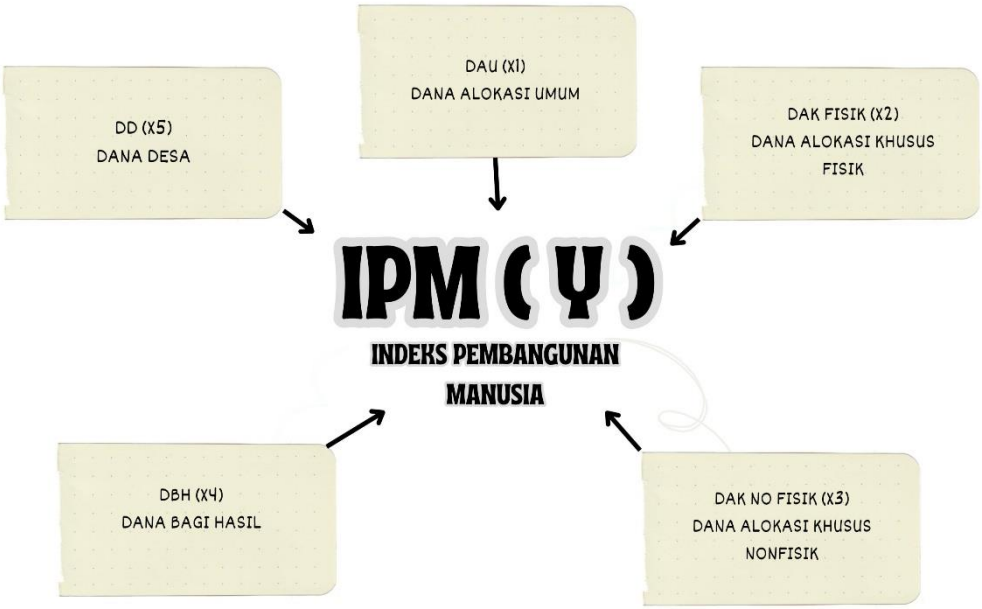

Gambar 2 Kerangka Analisis

2.4 HIPOTESIS

1. H1: Dana Alokasi Umum (DAU),Dana Alokasi Khusus (DAK),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Desa (DD) berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di 25 kabupaten di Sumatera Utara.

2. H2: Dana Alokasi Umum (DAU),Dana Alokasi Khusus (DAK),Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Desa (DD) berpengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di 25 kabupaten di Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder untuk menganalisis hubungan dinamis antara variabel-variabel desentralisasi fiskal (DAU, DAK, DBH, DD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 25 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan dipilih karena mampu menangani struktur data panel (gabungan *time series* dan *cross-section*) serta mengidentifikasi hubungan kausalitas dan kointegrasi jangka panjang antar variabel.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan relevansi dengan konteks penelitian. Variabel independen meliputi komponen desentralisasi fiskal (DAU, DAK, DBH, DD), sedangkan variabel dependen adalah IPM.

Tabel 4 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
IPM	Indeks komposit yang mengukur capaian kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat	BPS Sumatera Utara *www.bps.go.id*
DAU	Transfer dana dari APBN ke daerah untuk pemerataan fiskal (dalam triliun rupiah)	BPS Sumatera Utara *www.bps.go.id*
DAK	Dana khusus untuk proyek infrastruktur dan non-fisik (dalam triliun rupiah)	BPS Sumatera Utara

		www.bps.go.id
DBH	Dana bagi hasil dari SDA dan pajak (dalam triliun rupiah)	BPS Sumatera Utara, *www.bps.go.id*
DD	Dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (dalam triliun rupiah)	BPS Sumatera Utara, *www.bps.go.id*

Data dikumpulkan dalam format panel dengan 25 unit *cross-section* (kabupaten/kota) dan 5 *time-series* (tahun 2019–2023). Normalisasi data dilakukan untuk memastikan konsistensi satuan, dan *missing values* diatasi dengan interpolasi linier.

3.3 Kerangka Konsep

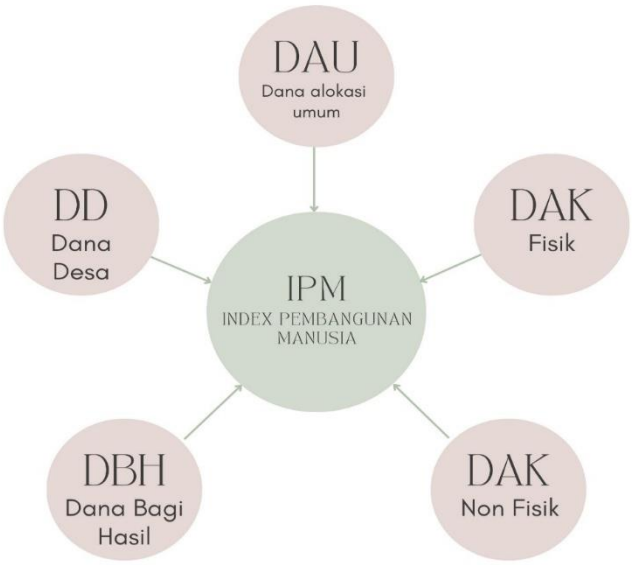

Gambar 3 Kerangka Konsep Model Estimasi

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data sekunder diambil dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa PDTT. Data mencakup:

1. Data Fiskal: Realisasi DAU, DAK, DBH, dan DD
2. Data Sosio-Ekonomi: IPM dari BPS.
3. Data Pendukung: Kebijakan desentralisasi, dokumen APBD, dan laporan keuangan daerah.

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Keuangan RI, Bank Indonesia data dalam bentuk buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Penelitian ini dilakukan dengan melihat data setiap kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan melihat data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Kuangan RI dan Bank Indonesia.

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian ini direncana selama 3 bulan yang dimulai dari bulan feruari sampai dengan April 2025.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui website- website resmi Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan objek

penelitian 25 kabupaten Diprovinsi di pulau sumatera kurun waktu selama 5 tahun (2019 – 2023).

3.7 Teknik Analisis

3.7.1 Analisis Ekonomi Deskriftif Desentralisasi Fiskal 25 kabupaten

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik,maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriftif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan desentralisai fiskal terhadap IPM dan pembangunan ekonomi sumatera utara pada tahun *2019-2023*.

3.7.2 Analisa Model Ekonometrika

A. Model Etimasi

Model Etimasi pada penelitian ini adalah model regresi data panel yang menggabungkan data *time series (t)* dengan data *cross section (i)* memiliki bentuk umum model Ekonometrika menggunakan data panel di tunjukkan oleh notasi *"it"* sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta 0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 DD_{it} + \boldsymbol{\alpha}_{it} + \boldsymbol{\mu}_{it}$$

Dimana:

IPM = Indeks Pebangunan Manusia (Persen)

DAU = Dana Alokasi Umum (Ribu Rupiah)

DAK = Dana Alokasi Khusus (Ribu Rupiah)

DBH = Dana Bagi Hasil (Ribu Rupiah)

DD = Dana Desa (Ribu Rupiah)

β 1 = Koefisien regresi

i = Data *Cross Section*

t = Data *Time Series*

α = unobserved factor, menunjukkan nilai antar-cross section

μ = Disturbance error

B. Metode Etimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variable yang diamati menggunakan data data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) dalam kurun waktu 5 tahun (dari tahun 2019 sampai 2023). Terdapat tiga ragam model yang di hasilkan dalam Model Panel Data.

1.Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah metode estimasi dalam data panel yang mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan spesifik antar individu maupun antar waktu dalam dataset. Dalam model ini, semua unit cross-section (misalnya kabupaten/kota) dianggap memiliki karakteristik yang sama, sehingga hanya satu regresi umum yang digunakan untuk seluruh data tanpa mempertimbangkan variabel laten yang mungkin berbeda di antara unit-unit tersebut. CEM sering kali digunakan sebagai pendekatan awal dalam analisis data panel sebelum memutuskan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) lebih sesuai.

Meskipun CEM lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan, kelemahan utamanya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menangkap heterogenitas individu dan variasi waktu. Model ini dapat menghasilkan estimasi yang bias jika terdapat perbedaan karakteristik antar unit yang tidak terobservasi tetapi mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, uji statistik seperti uji Chow digunakan untuk menentukan apakah CEM cukup atau perlu beralih ke model yang lebih kompleks seperti FEM.

Bentuk umum model CEM dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = variabel independen

i = cross section

t = time series

e = error

2. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (*FEM*) adalah metode estimasi dalam data panel yang memperhitungkan perbedaan spesifik antar unit cross-section dengan memasukkan efek tetap (*fixed effects*). Model ini mengasumsikan bahwa setiap

unit memiliki karakteristik unik yang tetap konstan selama periode waktu penelitian, tetapi tidak dapat diamati langsung. Dengan demikian, FEM memungkinkan adanya intercept yang berbeda untuk setiap unit, yang bertujuan untuk mengontrol variabel yang tidak teramati namun tetap konstan dalam jangka waktu tertentu.

Asumsi penting yang digunakan dalam model FEM bahwa nilai perbedaan antarindividu (ditunjukkan oleh *unobserved factor*) dapat berkorelasi dengan variabel bebas. Etimasi yang digunakan adalah *Panel OLS*. Terdapat beberapa Teknik etimasi yakni *least square dummy variable* (*LSDV*), between estimator, dan within estimator.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \beta_4 X_{it} + \boldsymbol{e}_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = variabel independen

i = cross section

t = time series

e = error

3.Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (*REM*) adalah metode estimasi dalam data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan antar unit *cross-section* bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Tidak seperti *Fixed Effect Model (FEM),* yang menganggap perbedaan antar unit sebagai efek tetap yang harus dikontrol, *REM* memperlakukan perbedaan tersebut sebagai bagian dari *error term*. Oleh karena itu, dalam *REM*, *intercept* tidak tetap untuk setiap unit tetapi dianggap sebagai nilai rata-rata ditambah dengan komponen error spesifik untuk setiap unit.

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar-individu dan atau waktu dicerminkan lewat *intercept*, maka pada Model Efek Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat *error* dari suatu model. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*.

$$Y_{it} = \boldsymbol{\alpha} + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \beta_4 X_{it} + \beta_n X_{it} + \boldsymbol{e}_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = variabel independen

i = cross section

t = time series

e = error

C. Tahap Analisis

1.Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X) dalam sebuah model regresi. Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 berarti model memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi data, sedangkan semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa model kurang mampu menjelaskan hubungan antara variabel.

Jika nilai R2 tinggi, berarti model memiliki tingkat ketepatan yang baik dalam memprediksi nilai variabel dependen. Namun, dalam regresi berganda, sering juga digunakan *Adjusted* R2 untuk memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model agar tidak terjadi *overfitting*.

2.Pengujian (Test Diagnostik)

A) Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (individu) antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak, dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*). dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

a) Jika |t-hitung| > t-tabel, maka H_0 ditolak → artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b) Jika |t-hitung| ≤ t-tabel, maka H_0 gagal ditolak → artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRB Perkapita Terhadap IPM. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

Perumusan Hipotesis:

Hipotesis H0 : $\beta 1 = \beta 2 = \beta 3 = \beta 4 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing- masing variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil ,dana desa, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, penyaluran kredit dan pdrb perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di pulau sumatera).

Hipotesis Ha $\neq \beta 1 \neq \beta 2 \neq \beta 3 \neq \beta 4 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil ,dana desa, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, penyaluran kredit dan pdrb perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di pulau sumatera)

Uji stastitik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah:

$$\mathbf{t_h} = \frac{\beta i}{se - \beta i} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

dimana:

$\beta 1$ = Dana Alokasi Umum

$\beta 2$ = Dana Alokasi Khusus

$\beta 3$ = Dana Bagi Hasil

$\beta 4$ = Dana Desa

B)Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD), secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan membangun (IPM) Dengan langkah Langkah sebagai berikut:

Perumusan Hipotesis:

Hipotesis Hipotesis H0 : β1= β2= β3 =β4 = 0 (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil ,dana desa, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, penyaluran kredit dan pdrb perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di pulau sumatera)

Hipotesis Ha ≠ β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil ,dana desa, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, penyaluran kredit dan pdrb perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di pulau sumatera)

Uji stastistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

$$\mathbf{F}=\frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)}\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel = F (α, n – k – 1) dengan derajat kesalahan α = 10%

Kreteria Uji :Terima jika H0 jika Fhitung < Ftabel, hal lain tolak H0.

C.Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan dalam regresi linear untuk memastikan bahwa model yang digunakan menghasilkan estimasi yang tidak bias, efisien, dan konsisten sesuai dengan asumsi model *Ordinary Least Squares (OLS),*terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi.

1) Multikolinieritas

   Multikolinieritas terjadi ketika terdapat hubungan linear yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi, sehingga sulit untuk menentukan pengaruh individual dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. multikolinieritas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan meskipun secara teori variabel tersebut berpengaruh. Deteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor (VIF),* di mana nilai VIF lebih dari 10 mengindikasikan adanya multikolinieritas tinggi *(Gujarati & Porter, 2009)* ,Untuk mengatasi masalah ini, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah menghilangkan salah satu variabel yang berkorelasi tinggi, menggunakan *Principal Component Analysis (PCA),* atau menambah jumlah data untuk mengurangi efek multikolinieritas.

2) Heterokedastisitas

   Heterokedastisitas terjadi ketika varians dari residual dalam model regresi tidak konstan, melainkan berubah-ubah seiring dengan nilai variabel independen. heterokedastisitas dapat menyebabkan hasil estimasi

Ordinary Least Squares (OLS) menjadi tidak efisien, sehingga kesalahan standar dari koefisien regresi menjadi bias dan mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat. Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode seperti uji *Glejser*, uji *Breusch-Pagan*, atau melihat pola pada plot scatter antara residual dan variabel independen. Jika heterokedastisitas terdeteksi, solusinya adalah menggunakan metode *Weighted Least Squares (WLS)* atau melakukan transformasi data, seperti *logaritma* atau *differencing*, agar varians residual menjadi lebih homogen *(Gujarati & Porter, 2009)*

3) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model regresi yang lebih sesuai adalah model efek tetap (*Fixed Effects Model/FEM*) atau model efek acak (*Random Effects Model/REM*) dalam analisis data panel. *(Hausman, 1978)* mengemukakan bahwa uji ini membandingkan estimasi kedua model dengan melihat apakah perbedaan antara keduanya signifikan. Jika perbedaan tersebut signifikan, maka model FEM lebih tepat digunakan, sementara jika tidak signifikan, model REM lebih sesuai. Secara teknis, uji Hausman menggunakan hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa estimasi dari *REM* adalah tidak bias dan lebih efisien dibanding FEM. Jika nilai probabilitas dari uji Hausman lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), maka H0 ditolak dan *FEM* digunakan. Jika probabilitas lebih besar dari α, maka REM lebih baik. Penggunaan uji ini penting untuk memastikan bahwa model yang dipilih dapat memberikan hasil yang akurat dalam penelitian berbasis data panel *(Baltagi, 2005)*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pulau Sumatera

4.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau Sumatera dan secara astronomis berada antara 1° hingga 4° Lintang Utara serta 97° hingga 100° Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh di sebelah utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah selatan, Selat Malaka di sebelah timur, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Letaknya yang strategis menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah penting dalam jalur perdagangan nasional maupun internasional, terutama karena memiliki akses langsung ke perairan internasional.

Kondisi geografis Sumatera Utara sangat beragam, mencakup wilayah pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, hingga pegunungan. Wilayah barat Sumatera Utara didominasi oleh pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara ke selatan, dan merupakan kawasan vulkanik yang subur. Salah satu gunung berapi aktif yang terkenal di provinsi ini adalah Gunung Sinabung. Di sisi timur, wilayahnya lebih didominasi oleh dataran rendah dan rawa-rawa yang subur, terutama di daerah sekitar pantai timur yang menghadap ke Selat Malaka.Sumatera Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Kawasan Danau Toba, danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara, menjadi ikon geografis dan sekaligus pusat ekowisata provinsi ini. Selain Danau Toba, banyak sungai besar seperti Sungai Asahan dan Sungai Wampu yang menjadi sumber air utama

untuk pertanian dan kehidupan masyarakat. Hutan tropis yang masih cukup luas juga menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik.

Provinsi ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 23°C hingga 31°C tergantung pada ketinggian wilayah. Meskipun tanahnya subur dan mendukung pertanian, wilayah ini juga rentan terhadap bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan banjir. Gunung Sinabung yang beberapa kali mengalami erupsi dalam dekade terakhir menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan wilayah dan mitigasi bencana di Sumatera Utara.

4.1.2 Kondisi Topografi

Pulau Sumatera memiliki topografi atau bentuk muka bumi yang berbeda antara wilayah barat dan timur nya. Pada bagian barat pulau, terbentang Bukit Barisan yang membujur dari utara hingga ke selatan. Diantaranya terdapat gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Kerinci yang ada di Provinsi Jambi.

Sedangkan pada daerah Timur Pulau Sumatera banyak dijumpai sungai dan rawa. Sungai yang mengalir biasanya merupakan sungai besar yang bermuara pada pantai timur Sumatera. Contoh sungai nya adalah : Sungai Asahan (Sumatera Utara), Sungai Musi (Sumatera Selatan), Sungai Siak (Riau), dan Sungai Enim (Sumatera Selatan).Selain sungai, pulau sumatera juga memiliki banyak danau, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Laut Tawar (Aceh), Danau Singkarak (Sumatera Barat, Danau Ranau (Sumatera Selatan), dan Danau Tes (Bengkulu).

Nama-nama gunung di Pulau Sumatra contohnya Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, Gunung Masurai, Gunung Talamau, Gunung Marapi, dan Gunung Sinabung. Nama-nama sungai di Pulau Sumatra Sungai Musi,

Sungai Batanghari, Sungai Indragiri, Sungai Kampar, dan Sungai Lematang. Nama-nama dataran rendah di Pulau Sumatra contohnya Dataran Rendah Air Hitam , Dataran Rendah Danau Emas, dan Dataran Rendah Anggi Giji.

4.1.3 Luas Wilayah

Topografi Sumatera Utara sangat beragam dan mencerminkan kontur alam yang kompleks. Provinsi ini terbentang dari daerah pantai hingga pegunungan, menciptakan berbagai bentuk permukaan bumi seperti dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan tinggi. Keanekaragaman ini tidak hanya memengaruhi jenis tanah dan vegetasi yang ada, tetapi juga memengaruhi pola pemukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat di setiap wilayah.

Bagian barat Sumatera Utara didominasi oleh pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara ke selatan. Di wilayah ini terdapat dataran tinggi seperti Dataran Tinggi Karo dan Dataran Tinggi Mandailing. Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut, dengan Gunung Sinabung sebagai salah satu puncak tertingginya. Topografi ini membuat wilayah barat menjadi daerah yang sejuk dan subur, cocok untuk pertanian hortikultura dan perkebunan.

Sebaliknya, bagian timur provinsi ini terdiri dari dataran rendah dan wilayah pesisir yang menghadap ke Selat Malaka. Dataran rendah ini membentang luas dan digunakan secara intensif untuk kegiatan pertanian, terutama padi dan kelapa sawit. Sungai-sungai besar seperti Sungai Asahan dan Sungai Wampu mengalir melalui dataran ini dan berperan penting dalam sistem irigasi dan transportasi air. Daerah pesisir ini juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting, seperti Pelabuhan Belawan di Kota Medan.

Topografi unik lainnya adalah keberadaan Danau Toba, yang merupakan kaldera raksasa dari letusan supervulkanik ribuan tahun lalu. Danau ini dikelilingi oleh lereng curam dan dataran tinggi yang memberikan keindahan alam luar biasa serta menjadi destinasi wisata unggulan. Pulau Samosir yang berada di tengah danau merupakan bagian dari lembah vulkanik yang telah naik ke permukaan. Wilayah ini juga merupakan pusat kehidupan masyarakat Batak Toba dan memiliki nilai budaya serta geologi yang tinggi.

4.2 Transfer Dana Sumatera Utara

4.2.1 Dana Alokasi Umum

Tabel 5 Rincian Dana Alokasi Umum 25 Kab.Sumut (Satuan Miliyar)

KABUPATEN	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	2023	**2024**
Nias	317.255.515	442.579.434
Mandailing Natal	605.146.922	870.070.825
Tapanuli Selatan	449.882.939	686.582.207
Tapanuli Tengah	468.920.893	651.549.789
Tapanuli Utara	525.531.008	677.223.717
Toba	462.735.540	572.130.142
Labuhanbatu	550.168.160	703.270.785
Asahan	720.683.971	931.476.359
Simalungun	1.000.424.080	1.451.560.802
Dairi	531.582.373	650.948.740
Karo	587.581.104	741.308.543
Deli Serdang	1.391.943.031	1.707.252.975
Langkat	996.027.378	1.278.300.316
Nias Selatan	499.669.939	682.305.257
Humbang Hasundutan	405.943.369	523.125.412
Pakpak Bharat	248.525.819	348.655.826

Samosir	369.358.940	444.290.749
Serdang Bedagai	621.048.110	857.654.425
Batubara	473.312.482	608.903.089
Padang Lawas Utara	406.414.830	549.925.444
Padang Lawas	383.982.725	525.309.409
Labuhanbatu Selatan	405.912.050	522.121.461
Labuhanbatu Utara	466.072.644	609.666.234
Nias Utara	294.838.588	434.024.462
Nias Barat	262.598.326	359.932.822

Sumber : prp2 sumut

Tabel 6 5 Peringkat Kabupaten Tertinggi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023-2024 (Satuan Miliyar)

Peringkat	Kabupaten	DAU 2024 (Rp)	DAU 2023 (Rp)	Kenaikan (%)
1	**Deli Serdang**	1.707.252.975	1.391.943.031	**+22,7%**
2	**Simalungun**	1.451.560.802	1.000.424.080	**+45,1%**
3	**Langkat**	1.278.300.316	996.027.378	**+25,4%**
4	**Asahan**	931.476.359	720.683.971	**+29,2%**
5	**Mandailing Natal**	870.070.825	605.146.922	**+43,8%**

1. **Deli Serdang** tetap menjadi penerima DAU terbesar di Sumatera Utara pada tahun 2024 sebesar **Rp 1,7 triliun**, naik **22,7%** dari tahun 2023.
2. **Simalungun** mengalami lonjakan signifikan dengan kenaikan **45,1%**, naik dari **Rp 1 triliun** menjadi **Rp 1,45 triliun**.
3. **Langkat** naik **25,4%**, dari **Rp 996 miliar** menjadi **Rp 1,27 triliun**.
4. **Asahan** memperoleh **Rp 931 miliar**, naik **29,2%** dari tahun sebelumnya.

5. **Mandailing Natal** juga mengalami kenaikan besar, yakni **43,8%**, dari **Rp 605 miliar** menjadi **Rp 870 miliar**.

Tabel yang ditampilkan menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk berbagai kabupaten di Sumatera Utara dari tahun 2023 hingga 2024. DAU adalah salah satu bentuk transfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung kebutuhan dasar pemerintahan daerah. Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kabupaten mengalami fluktuasi nilai DAU dari tahun ke tahun, dengan penurunan tajam pada tahun 2021 yang kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian kebijakan fiskal nasional, dan kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga 2024. Beberapa kabupaten seperti Deli Serdang, Simalungun, dan Langkat menerima DAU tertinggi, mencerminkan skala wilayah dan kebutuhan fiskal yang lebih besar.

Sementara itu, kabupaten seperti Pakpak Bharat, Nias Barat, dan Nias Utara menerima DAU dalam jumlah relatif lebih kecil, yang bisa jadi disebabkan oleh jumlah penduduk yang lebih sedikit atau kapasitas fiskal yang lebih rendah. Terjadi peningkatan cukup signifikan pada sebagian besar kabupaten antara tahun 2022 hingga 2024, menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan anggaran setelah dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi fiskal daerah di tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, terdapat inkonsistensi dalam format angka, khususnya pada tahun 2021, yang menunjukkan satuan berbeda dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk analisis akurat.

4.2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel 7 Rincian Dana Alokasi Khusus Kab.Sumut (Satuan Miliyar)

KABUPATEN	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	
	2023	**2024**
Nias	6.934.945.000	45.266.030.000
Mandailing Natal	12.887.696.000	29.144.162.000
Tapanuli Selatan	8.338.202.000	6.262.244.000
Tapanuli Tengah	6.668.806.000	6.304.549.000
Tapanuli Utara	7.912.400.000	5.660.603.000
Toba	3.466.469.000	22.024.861.000
Labuhanbatu	46.457.165.000	15.570.103.000
Asahan	8.842.714.000	18.258.616.000
Simalungun	39.354.703.000	48.894.150.000
Dairi	3.903.205.000	12.494.431.000
Karo	2.615.403.000	26.838.416.000
Deli Serdang	14.243.014.000	22.461.139.000
Langkat	10.201.565.000	12.717.400.000
Nias Selatan	12.680.221.000	42.619.439.000
Humbang Hasundutan	6.865.777.000	2.772.023.000
Pakpak Bharat	6.865.777.000	1.429.199.000
Samosir	15.083.444.000	15.083.444.000
Serdang Bedagai	16.194.309.000	16.194.309.000
Batubara	25.950.929.000	25.950.929.000
Padang Lawas Utara	8.687.722.000	8.687.722.000
Padang Lawas	6.446.771.000	6.446.771.000
Labuhanbatu Selatan	10.759.876.000	10.759.876.000
Labuhanbatu Utara	7.541.403.000	7.541.403.000
Nias Utara	30.508.920.000	30.508.920.000
Nias Barat	2.264.355.000	88.725.662.000

Sumber : prp2 sumut

Tabel 8 5 Peringkat Kabupaten Tertinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2023-2024 (Satuan Miliyar)

Peringkat	Kabupaten	DAK 2024 (Rp)	DAK 2023 (Rp)	Kenaikan (%)
1	**Nias Barat**	88.725.662.000	2.264.355.000	**+3.819%**
2	**Simalungun**	48.894.150.000	39.354.703.000	**+24,2%**
3	**Nias**	45.266.030.000	6.934.945.000	**+552,6%**
4	**Nias Selatan**	42.619.439.000	12.680.221.000	**+236,1%**
5	**Batubara**	25.950.929.000	25.950.929.000	**0% (tetap)**

1. **Nias Barat** mencatat **lonjakan tertinggi**, dari hanya Rp 2,26 miliar pada 2023 menjadi **Rp 88,72 miliar** pada 2024 — naik sekitar **3.819%**.
2. **Simalungun** tetap konsisten sebagai penerima DAK besar, meningkat dari Rp 39,35 miliar menjadi **Rp 48,89 miliar** (**+24,2%**).
3. **Nias** melonjak **552,6%**, dari Rp 6,93 miliar menjadi **Rp 45,26 miliar**.
4. **Nias Selatan** juga mengalami peningkatan signifikan sebesar **236,1%**, dari Rp 12,68 miliar menjadi **Rp 42,61 miliar**.
5. **Batubara** tetap berada di peringkat 5 meskipun **tidak mengalami perubahan** nilai DAK dari tahun sebelumnya.

Data Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2019 hingga 2024 untuk kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan dinamika alokasi anggaran yang cukup signifikan. Pada periode 2019–2021, nilai DAK terbilang kecil, bahkan berada di bawah angka satu miliar rupiah, menandakan bahwa saat itu dana ini belum menjadi instrumen fiskal utama atau belum dioptimalkan. Namun, sejak tahun 2022 terjadi lonjakan yang sangat besar—misalnya DAK untuk Kabupaten Nias naik dari Rp121 juta di 2021 menjadi lebih dari Rp14 miliar di 2022, dan melonjak drastis ke Rp45 miliar di 2024. Fenomena serupa terjadi di banyak kabupaten lain, seperti Nias Selatan, Simalungun, dan Mandailing Natal.

Lonjakan ini mengindikasikan adanya kebijakan nasional yang memperbesar peran DAK dalam pembiayaan pembangunan daerah, mungkin sebagai respon terhadap pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Selain itu, beberapa kabupaten mengalami kenaikan DAK yang sangat besar secara tiba-tiba, seperti Nias Barat yang dari hanya Rp2 miliar pada 2023 melonjak drastis ke Rp88 miliar di 2024. Ini bisa disebabkan oleh proyek strategis nasional atau pembangunan infrastruktur besar di daerah tersebut. Namun, terdapat pula kabupaten yang justru mengalami penurunan, seperti Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat. Data ini mencerminkan bahwa alokasi DAK bersifat selektif dan berbasis pada program prioritas tahunan pemerintah pusat. Perubahan tajam dari tahun ke tahun juga menunjukkan perlunya mekanisme perencanaan dan penganggaran yang adaptif di tingkat daerah agar mampu memanfaatkan dana yang ada secara optimal.

4.2.3 Dana Bagi Hasil

Tabel 9 Rincian Dana Bagi Hasil Kab.Sumut pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara (Satuan Miliyar)

KABUPATEN	DANA BAGI HASIL (DBH)	
	2023	**2024**
Nias	4.753.257.000	6.863.035.000
Mandailing Natal	9.543.279.000	35.147.900.000
Tapanuli Selatan	11.780.293.000	56.186.113.000
Tapanuli Tengah	8.770.996.000	11.763.650.000
Tapanuli Utara	7.853.833.000	37.245.712.000
Toba	7.641.338.000	11.129.381.000
Labuhanbatu	10.579.839.000	33.583.641.000
Asahan	18.273.604.000	48.876.631.000

Simalungun	17.244.179.000	47.374.864.000
Dairi	8.513.744.000	8.251.055.000
Karo	7.931.896.000	10.159.156.000
Deli Serdang	9.498.198.000	57.126.151.000
Langkat	14.208.953.000	103.152.719.000
Nias Selatan	11.925.812.000	8.781.258.000
Humbang Hasundutan	5.880.980.000	7.810.125.000
Pakpak Bharat	4.220.513.000	6.352.376.000
Samosir	2.939.447.000	7.641.338.000
Serdang Bedagai	10.548.725.000	10.579.839.000
Batubara	10.120.480.000	18.273.604.000
Padang Lawas Utara	10.841.558.000	17.244.179.000
Padang Lawas	14.804.342.000	8.513.744.000
Labuhanbatu Selatan	15.642.224.000	7.931.896.000
Labuhanbatu Utara	16.846.713.000	9.498.198.000
Nias Utara	11.173.596.000	6.930.756.000
Nias Barat	4.753.257.000	7.688.074.000

Sumber:Prp2 Sumut

Tabel 10 5 Peringkat Kabupaten Tertinggi Dana Bagi Hasil (DBH) pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2023-2024 (Satuan Miliyar)

Peringkat	Tertinggi Kabupaten	DBH 2024 (Rp)	DBH 2023 (Rp)	Kenaikan (%)
1	**Langkat**	103.152.719.000	14.208.953.000	**+626,1%**
2	**Deli Serdang**	57.126.151.000	9.498.198.000	**+501,5%**
3	**Tapanuli Selatan**	56.186.113.000	11.780.293.000	**+377,1%**
4	**Asahan**	48.876.631.000	18.273.604.000	**+167,5%**
5	**Simalungun**	47.374.864.000	17.244.179.000	**+174,8%**

1. **Langkat** mencatat **penerimaan DBH tertinggi** di tahun 2024 sebesar **Rp 103,15 miliar**, melonjak **626,1%** dari tahun sebelumnya.

2. **Deli Serdang** mengalami kenaikan drastis sebesar **501,5%**, dari Rp 9,49 miliar menjadi **Rp 57,12 miliar**.
3. **Tapanuli Selatan** naik tajam sebesar **377,1%**, dari Rp 11,78 miliar menjadi **Rp 56,18 miliar**.
4. **Asahan** menerima DBH sebesar **Rp 48,87 miliar**, meningkat **167,5%** dari Rp 18,27 miliar.
5. **Simalungun** memperoleh **Rp 47,37 miliar**, naik **174,8%** dari tahun sebelumnya.

Data Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2019–2024 menunjukkan fluktuasi signifikan, di mana daerah seperti Langkat dan Deli Serdang consistently menerima alokasi tertinggi, sementara daerah seperti Pakpak Bharat dan Nias Barat mendapat alokasi terendah. Tahun 2020 tampak sebagai anomali dengan lonjakan DBH di banyak daerah, kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pusat saat pandemi. Secara umum, tren ini mencerminkan ketergantungan daerah terhadap kebijakan pusat dan variabel eksternal seperti harga komoditas, sehingga menekankan pentingnya diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

4.2.4 Dana Desa

Tabel 11 Rincian Dana Desa Di Kab.Sumut pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara (Satuan Miliyar)

KABUPATEN	DANA DESA (DD)	
	2023	**2024**
Nias	143.305.742.000	146.553.998.000
Mandailing Natal	296.235.720.000	298.743.368.000
Tapanuli Selatan	158.866.300.000	161.260.834.000
Tapanuli Tengah	138.507.142.000	137.664.127.000
Tapanuli Utara	193.031.650.000	193.887.765.000
Toba	169.156.030.000	172.017.796.000
Labuhanbatu	75.441.232.000	75.433.256.000
Asahan	168.778.464.000	169.773.159.000
Simalungun	330.739.159.000	332.974.670.000
Dairi	131.686.562.000	132.189.467.000
Karo	197.014.863.000	198.789.890.000
Deli Serdang	339.139.699.000	343.908.576.000
Langkat	236.620.647.000	239.691.169.000
Nias Selatan	390.238.162.000	394.020.949.000
Humbang Hasundutan	123.002.107.000	124.705.525.000
Pakpak Bharat	39.204.342.000	40.049.196.000
Samosir	98.627.054.000	100.353.697.000
Serdang Bedagai	201.500.768.000	204.142.649.000
Batubara	131.874.953.000	132.176.161.000
Padang Lawas Utara	254.914.319.000	291.776.991.000
Padang Lawas	227.794.661.000	230.195.456.000
Labuhanbatu Selatan	58.057.565.000	59.203.174.000
Labuhanbatu Utara	87.414.111.000	87.244.073.000
Nias Utara	111.172.780.000	108.038.391.000
Nias Barat	95.262.490.000	93.643.690.000

Sumber:prp2 sumut

Tabel 12 5 Peringkat Kabupaten Tertinggi Dana Desa (DD) pada 25 Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2023-2024 (Satuan Miliyar)

Peringkat	Kabupaten	DD 2024 (Rp)	DD 2023 (Rp)	Kenaikan (%)
1	**Nias Selatan**	394.020.949.000	390.238.162.000	**+0,97%**
2	**Deli Serdang**	343.908.576.000	339.139.699.000	**+1,41%**
3	**Simalungun**	332.974.670.000	330.739.159.000	**+0,68%**
4	**Mandailing Natal**	298.743.368.000	296.235.720.000	**+0,85%**
5	**Padang Lawas Utara**	291.776.991.000	254.914.319.000	**+2,41%**

1. **Nias Selatan** menjadi kabupaten dengan penerimaan Dana Desa tertinggi tahun 2024 yaitu **Rp 394 miliar**, naik sekitar **0,97%** dari tahun sebelumnya.
2. **Deli Serdang** menempati posisi kedua dengan **Rp 343,9 miliar**, naik **1,41%** dibanding 2023.
3. **Simalungun** di posisi ketiga dengan **Rp 332,9 miliar**, mengalami kenaikan tipis sebesar **0,68%**.
4. **Mandailing Natal** menerima **Rp 298,7 miliar**, naik **0,85%**.
5. **Padang Lawas Utara** menempati peringkat kelima, dan justru mengalami **kenaikan tertinggi dalam persentase** di antara lima besar, yakni **+2,41%**.

Data Dana Desa (DD) tahun 2019–2024 di Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan di berbagai kabupaten, baik dari sisi jumlah maupun tren pertumbuhannya. Beberapa daerah seperti Nias Selatan, Langkat, dan Deli Serdang mendapatkan alokasi DD yang sangat besar, yang kemungkinan ditujukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan desa. Namun, tidak semua kabupaten menunjukkan tren

peningkatan yang konsisten; misalnya, Labuhanbatu Selatan dan Nias Utara cenderung mengalami penurunan alokasi. Hal ini dapat mencerminkan adanya perubahan kebijakan pengalokasian anggaran atau penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kinerja masing-masing wilayah.

4.2.5 Index Pembangunan Manusia

Tabel 13 Index Pembangunan Manusia

KABUPATEN	Index Pembangunan Manusia (IPM)					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Nias	61.65	61.93	62.74	63.69	64.56	66,13
Mandailing Natal	66.52	66.79	67.19	68.05	68.56	73,44
Tapanuli Selatan	69.75	70.12	70.33	70.92	71.55	75,18
Tapanuli Tengah	68.86	69.23	69.61	70.31	70.91	73,34
Tapanuli Utara	73.33	73.47	73.76	74.14	74.65	77,48
Toba	74.92	75.16	75.39	75.96	76.38	78,44
Labuhanbatu	71.94	72.01	72.09	72.92	73.69	75,20
Asahan	69.92	70.29	70.49	71.13	71.56	74,17
Simalungun	72.98	73.25	73.4	73.77	74.29	75,88
Dairi	71.42	71.57	71.84	72.56	73.27	74,63
Karo	74.25	74.43	74.83	75.36	75.98	77,49
Deli Serdang	75.43	75.44	75.53	76.19	76.52	77,56
Langkat	70.76	71	71.35	71.86	72.21	74,85
Nias Selatan	61.59	61.89	62.35	63.17	64.12	65,87
Humbang Hasundutan	68.83	68.87	69.41	70.32	70.75	73,33
Pakpak Bharat	67.47	67.59	67.94	68.85	69.58	73,09
Samosir	70.55	70.63	70.83	71.67	72.08	73,77
Serdang Bedagai	70.21	70.24	70.56	71.21	71.75	74,15
Batubara	68.35	68.36	68.58	69.51	70.31	73,14
Padang Lawas Utara	69.29	69.85	70.11	70.93	71.63	74,16
Padang Lawas	68.16	68.25	68.64	69.58	70.34	73,10
Labuhanbatu Selatan	71.39	71.4	71.69	72.16	72.82	75,11
Labuhanbatu Utara	71.43	71.61	71.87	72.77	73.63	76,20
Nias Utara	61.98	62.36	62.82	63.75	64.64	66,24
Nias Barat	61.14	61.51	61.99	62.93	63.7	65,66

Sumber:BPS sumut

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2019–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil di seluruh wilayah. Daerah seperti Deli Serdang, Toba, dan Karo secara konsisten mencatatkan IPM tertinggi, mengindikasikan kemajuan signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sebaliknya, wilayah seperti Nias, Nias Selatan, dan Nias Barat tetap berada di posisi terbawah meskipun mengalami pertumbuhan positif, yang menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Lonjakan signifikan pada tahun 2024 di hampir seluruh kabupaten/kota menandakan kemungkinan adanya intervensi kebijakan yang berdampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4.3 Hasil Analisis Ekonometrika

Setelah dilakukan estimasi data panel yaitu mencakup *common effect, fixed effect* dan *random effect*, maka langkah selanjutnya menentukan model estimasi mana yang cocok untuk dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Langrange Multiplier* (LM). Uji *Langrange Multiplier* dilakukan dengan catatan apabila setelah uji Chow model yang tepat digunakan yaitu fixed effect dan setelah uji Hausman model yang digunakan yaitu random effect. Namun apabila pada uji *Chow* dan uji *Hausman* model yang tepat digunakan adalah *fixed effect* maka tidak perlu dilakukan uji LM. Berikut merupakan uji statiskik estimasi data panel:

4.3.1 Uji Chow

Pada uji ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat model yang tepat digunakan antara *common effect* dan *fixed effect*. Dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.851400	(24,121)	0.0000
Cross-section Chi-square	140.842943	24	0.0000

Sumber : Eviews 13(diolah)

Gambar 4 Hasil Etimasi Uji Chow

Pada tabel di atas diketahuai bahwa probabilitas F adalah 0,000 <0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa metode *Fixed Effect* lebih baik digunakan. Selanjutnya untuk membandingkan *fixed effect* dan *random effect* digunakan uji *Hausman.* Yang perlu diperhatikan adalah perbandingannya dengan *Chi-Square Table,* jika *Hausman statistic* lebih besar dari *Chi-Square Table,* jika *Hausman statistic* lebih besar dari *Chi-Square Table* maka H1 diterima.

Jika *hausman statistic* lebih kecil daripada *chi-square* maka H0 diterima

H0 : *Random Effect* Model

H1 : *Fixed Effect* Model

Uji *Hausman* menggunakan program *eviews* menggunakan hasil sebagai berikut :

4.3.2 Uji Hausman

Uji hausman dilakukan dengan tujuan untuk melihat model mana yang tepat digunakan antara *fixed effect* dan *random effect*. Dengan hasil regresi sebagai berikut:

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	25.813993	4	0.0000

Sumber : Eviews 13(diolah)

Gambar 5 Hasil Etimasi Uji Hausman

Hasil regresi *fixed effect* vs *random effect* di atas didapat *probabilitas cross section* pada *random effect* sebesar 0.0000, artinya menolak H0. Jadi, bisa disimpulkan bahwa metode paling tepat adalah *fixed effect.*

Setelah dilakukan uji kelayakan model dengan uji *Chow* dan uji *Hausman*, kesimpulannya model yang baik digunakan dengan model *fixed effect.* Dengan begitu tidak perlu dilakukan uji *Langrange Multiplier* (LM).

Dependent Variable: Y_IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/21/25 Time: 15:21
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 150

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.42080	0.527139	131.6936	0.0000
X1_DAU	1.51E-06	7.46E-07	2.027407	0.0448
X2_DAK	7.60E-08	9.12E-09	8.337368	0.0000
X3_DBH	-1.05E-08	8.40E-09	-1.254397	0.2121
X4_DD	2.63E-07	1.41E-06	0.186735	0.8522

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.921778	Mean dependent var	70.63673
Adjusted R-squared	0.903677	S.D. dependent var	4.067261
S.E. of regression	1.262310	Akaike info criterion	3.475586
Sum squared resid	192.8046	Schwarz criterion	4.057642
Log likelihood	-231.6689	Hannan-Quinn criter.	3.712057
F-statistic	50.92450	Durbin-Watson stat	1.239819
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Eviews 13(diolah)

Gambar 6 Hasil Fixed Effect

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* (FEM).

Model terbaik dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM), sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji Chow dan uji Hausman. Model ini mampu menangkap perbedaan karakteristik tetap antar daerah, yang penting dalam konteks desentralisasi fiskal di daerah yang heterogen seperti Sumatera Utara.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Model yang terpilih adalah FEM, maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang di inginkan adalah multikolineritas dan heterosdastisitas (Basuki & yuliadi,2014: 183)

4.3.3 Uji Multikolenialitas

	X1_DAU	X2_DAK	X3_DBH	X4_DD
X1_DAU	1.000000	0.079642	0.487227	0.356306
X2_DAK	0.079642	1.000000	-0.127378	0.042043
X3_DBH	0.487227	-0.127378	1.000000	0.196842
X4_DD	0.356306	0.042043	0.196842	1.000000

Sumber : eviews 13 (diolah)

Gambar 7 Uji Multikolenialitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model. Multikolinearitas dapat menyebabkan gangguan pada estimasi koefisien regresi, sehingga interpretasi hubungan antara variabel menjadi tidak valid. Berdasarkan hasil uji korelasi antar variabel independen, diketahui bahwa nilai korelasi antara DAU dengan DAK sebesar 0,0796, antara DAU dengan DBH sebesar 0,4872, dan antara DAU dengan Dana Desa (DD) sebesar 0,3563. Sementara itu, nilai korelasi antara DAK dengan DBH adalah –0,1274, antara DAK dengan DD sebesar 0,0420, serta antara DBH dengan DD sebesar 0,1968.

Seluruh nilai korelasi berada jauh di bawah angka 0,80 yang biasanya dijadikan batas indikasi multikolinearitas yang kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi ini, dan masing-masing variabel independen dapat digunakan dalam model tanpa

menyebabkan distorsi terhadap estimasi parameter. Dengan demikian, berdasarkan interpretasi ini, model regresi yang dibangun dengan variabel X1 hingga X4 dapat dianggap bebas dari multikolinearitas yang signifikan, sehingga koefisien regresi yang dihasilkan akan lebih stabil dan dapat diinterpretasikan secara valid sesuai teori ekonomi atau sosial yang melandasi penelitian.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y_IPM C X1_DAU X2_DAK X3_DBH X4_DD
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	133.6914	25	0.0000

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-408.6316	145
Unrestricted LogL	-341.7859	145

Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: Y_IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/21/25 Time: 14:09
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 150
Iterate weights to convergence
Convergence achieved after 14 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.20808	0.350186	200.4877	0.0000
X1_DAU	1.67E-06	5.32E-07	3.135565	0.0021
X2_DAK	1.13E-07	1.56E-08	7.217256	0.0000
X3_DBH	8.25E-10	7.71E-09	0.107489	0.9145
X4_DD	-1.43E-06	1.50E-06	-0.956739	0.3403

Weighted Statistics			
R-squared	0.327785	Mean dependent var	161.8248
Adjusted R-squared	0.309241	S.D. dependent var	107.1768
S.E. of regression	4.248766	Akaike info criterion	4.623812
Sum squared resid	2617.542	Schwarz criterion	4.724167
Log likelihood	-341.7859	Hannan-Quinn criter.	4.664583
F-statistic	17.67620	Durbin-Watson stat	0.611635
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.062365	Mean dependent var	70.63673
Sum squared resid	2618.570	Durbin-Watson stat	0.131786

Sumber : Eviews 13 (diolah)

Gambar 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah varians dari error (residual) dalam model regresi data panel bersifat konstan atau tidak. Heterokedastisitas yang tidak ditangani dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien dan uji statistik (t dan F) menjadi tidak valid.

Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan menggunakan metode Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test pada perangkat lunak EViews. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Likelihood Ratio sebesar 133,6914 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas < 0,05, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas ditolak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas dalam model awal. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan metode estimasi EGLS (Estimated Generalized Least Square) dengan pembobotan cross-section weights. Metode ini dipilih karena mampu

menghasilkan estimasi yang lebih efisien meskipun terjadi ketidakkonsistenan varians (heterokedastisitas) antar unit cross-section.

Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah dikoreksi dari permasalahan heterokedastisitas, sehingga hasil estimasi dapat dianggap valid untuk dianalisis lebih lanjut.

Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan metode Panel Least squares diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathrm{IPM(Y)} = 69.42080 + 0.00000151 \cdot \mathrm{DAU} + 0.000000076 \cdot \mathrm{DAK} - 0.0000000105 \cdot \mathrm{DBH} + 0.000000263 \cdot \mathrm{DD}$$

1. Nilai konstanta sebesar 69.42080 dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi (Prob. = 0.0000). Hal ini berarti bahwa apabila seluruh variabel independen (DAU, DAK, DBH, dan DD) dianggap bernilai nol, maka nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkirakan sebesar 69,42. Angka ini mencerminkan tingkat dasar IPM di kabupaten/kota Sumatera Utara sebelum dipengaruhi oleh dana transfer fiskal.
2. Variabel DAU memiliki koefisien positif sebesar 1.51E-06 dengan nilai probabilitas 0.0448 (< 0.05). Artinya, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian, setiap peningkatan DAU sebesar 1 satuan (misalnya Rp1) akan meningkatkan IPM sebesar 0.00000151 poin, dengan asumsi variabel lain konstan. Secara substansial, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana umum dari pemerintah pusat mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, terutama melalui perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan.

3. Variabel DAK juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan koefisien 7.60E-08 dan nilai probabilitas 0.0000 (< 0.05). Hal ini berarti bahwa peningkatan DAK secara nyata dapat meningkatkan IPM di kabupaten/kota di Sumatera Utara. DAK berfungsi untuk mendanai kegiatan prioritas nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga wajar jika peningkatan DAK berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.
4. Variabel DBH memiliki koefisien negatif sebesar -1.05E-08 dengan nilai probabilitas 0.2121 (> 0.05). Artinya, DBH berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya dana bagi hasil yang diterima daerah belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan IPM, kemungkinan karena pengelolaan dana tersebut belum optimal atau lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daripada pembangunan sektor sosial.
5. Variabel Dana Desa memiliki koefisien positif sebesar 2.63E-07 dengan nilai probabilitas 0.8522 (> 0.05). Ini berarti Dana Desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Dengan kata lain, peningkatan Dana Desa belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan manusia, kemungkinan karena dana tersebut lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik desa yang efeknya terhadap kualitas hidup masyarakat membutuhkan waktu lebih panjang untuk terlihat.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM, sedangkan DBH dan Dana Desa tidak

memberikan pengaruh signifikan secara statistik. Oleh karena itu, perhatian lebih dapat diarahkan pada optimalisasi penggunaan DAU dan DAK untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah.

4.3.5 Hasil Uji Hipotesis

1) Hasil Uji t

Dependent Variable: Y_IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/21/25 Time: 15:21
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 150

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.42080	0.527139	131.6936	0.0000
X1_DAU	1.51E-06	7.46E-07	2.027407	0.0448
X2_DAK	7.60E-08	9.12E-09	8.337368	0.0000
X3_DBH	-1.05E-08	8.40E-09	-1.254397	0.2121
X4_DD	2.63E-07	1.41E-06	0.186735	0.8522

Sumber : Eviews 13(diolah)

Gambar 9 Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun hasil uji t dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- X1_DAU (Dana Alokasi Umum)

Berdasarkan hasil uji t, variabel DAU memiliki nilai t-hitung sebesar 2.027407 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.0448, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0.05. Artinya, secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM.

- X2_DAK (Dana Alokasi Khusus)

Variabel DAK menunjukkan t-hitung sebesar 8.337368 dengan p-value sebesar 0.0000, yang jauh lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa DAK secara signifikan mempengaruhi IPM.

- X3_DBH (Dana Bagi Hasil)

Nilai t-hitung untuk DBH adalah -1.254397 dengan p-value sebesar 0.2121, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, secara parsial DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

- X4_DD (Dana Desa)

Untuk variabel Dana Desa, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0.186735 dengan p-value sebesar 0.8522, yang juga jauh di atas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM secara parsial.

Dari keempat variabel independen, hanya DAU dan DAK yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap IPM berdasarkan uji t, hal ini sejalan dengan penelitian Irianto,dkk (2021). Sementara itu, DBH dan Dana Desa tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap IPM dalam model ini dan hal ini sejalan dalam penelitian Ika Septiani (2024). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal melalui instrumen DAU dan DAK berkontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mendukung proses pembangunan dan dapat menjadi landasan bagi kemandirian fiskal daerah apabila dikelola secara optimal. Namun, tidak signifikannya pengaruh DBH dan Dana Desa menunjukkan adanya tantangan

dalam distribusi dan pemanfaatan dana yang tidak merata, sehingga potensi untuk mengatasi ketimpangan antar daerah belum sepenuhnya tercapai.

2) Uji F

R-squared	0.921778
Adjusted R-squared	0.903677
S.E. of regression	1.262310
Sum squared resid	192.8046
Log likelihood	-231.6689
F-statistic	50.92450
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Eviews 13 (diolah)

Gambar 10 Hasil Uji F

Nilai F hitung sebesar 50.92450> F tabel yaitu 2.386069 dan nilai sig 0,000000 < 0,05 , Maka H0 ditolak dan Ha diterima, Artinya Variabel DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP berpengaruh terhadap IPM.

3)Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.921778
Adjusted R-squared	0.903677
S.E. of regression	1.262310
Sum squared resid	192.8046
Log likelihood	-231.6689
F-statistic	50.92450
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Eviews 13 (diolah)

Gambar 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Nilai adjusted R-square sebesar 0.903677 atau 90,3677%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP mampu menjelaskan variabel IPM di Pulau Sumatera sebesar 90,3677% sedangkan sisahnya yaitu 9,6323% (100-nilai adjusted r square) di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.0448, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0.05. Artinya, secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM.. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup , hal ini sejalan dengan penelitian Evi Sulastri dan Efendri (2019).

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). dengan p-value sebesar 0.0000, yang jauh lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa DAK secara signifikan mempengaruhi IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dengan demikian, desentralisasi fiskal melalui DAU dan DAK berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan Rizky Aditya pada tahun 2024 yang meneliti tentang pengaruh desentraliasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dalam model ini. dengan p-value sebesar 0.2121, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, secara parsial DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Ketidaksignifikanan ini dapat mencerminkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan DBH di tingkat daerah, atau adanya kesenjangan kapasitas antar daerah dalam mengelola anggaran tersebut. Hal ini menjadi indikasi bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah. DBH tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia dalam model ini dan hal ini sejalan dalam penelitian Fika Dista Wulandari (2024).

4. Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Desa (DD) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dalam model ini. Ketidaksignifikanan ini dapat mencerminkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan DD di tingkat daerah, atau adanya kesenjangan kapasitas antar daerah dalam mengelola anggaran tersebut. Hal ini menjadi indikasi bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah yang sejalan dengan hasil penelitian dari Finda Prisilla (2018).

5. Pengaruh Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Secara simultan, variabel-variabel fiskal (DAU, DAK, DBH, dan DD) berpengaruh signifikan terhadap IPM, ditunjukkan dengan hasil uji F. Nilai F hitung sebesar 50.92450> F tabel yaitu 2.386069 dan nilai sig 0,000000 < 0,05 , Maka H0 ditolak dan Ha diterima, Artinya Variabel DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP berpengaruh terhadap IPM yang sejalan dengan hasil penelitian dari Luthfi Tania Saragih (2023)

6. Koefisien Determinasi DAU,DAK,DBH dan DD Terhadap IPM

Nilai adjusted R-square sebesar 0.903677 atau 90,3677%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari DAU, DAK, DBH, DD, dan PDRBKAP mampu menjelaskan variabel IPM di Pulau Sumatera sebesar 90,3677% sedangkan sisahnya yaitu 9,6323% (100-nilai adjusted r square) di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model penelitian ini yang sejalan dengan hasil penelitian dari Luthfi Tania Saragih (2023)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana transfer pemerintah pusat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah dengan menggunakan model regresi data panel. Berdasarkan berbagai tahapan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari perspektif kemandirian fiskal, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, khususnya DAU dan DAK. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah, dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diperkuat agar ketergantungan dapat dikurangi secara bertahap.
2. Dari hasil penelitian varibael (DAU) dan (DAK) berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia, sementara variable (DBH) dan (Dana desa) berpengaruh negative atau tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

B.Saran

1. Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan DAU dan DAK karena terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM. Efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan lebih merata dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

2. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme penyaluran serta pemanfaatan DBH dan Dana Desa, agar potensi anggaran ini dapat lebih berkontribusi terhadap pembangunan manusia di daerah.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan seperti belanja pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, serta menggunakan pendekatan data panel jangka panjang, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM.

DAFTAR PUSTAKA

amarthya sen. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Bahl, R. (2001). *Urban Public Finance in Developing Countries.* Oxford University Press.

Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd Edition). John Wiley & Sons .

Becker, G. (1936). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. *The Journal Barriol,*.

Bird, R. M. ., Martinez-Vazquez, J., & Alm, J. (2003). *Public finance in developing and transitional countries : essays in honor of Richard Bird*. Edward Elgar.

dinar, & hasan. (2018). *Buku Pengantar Ekonomi*.

Esa Putra, R. (2022). Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumtera Utara. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan, Volume 11, Nomor 2, November 2022, Hal 98 - 106*. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains

Fika Dista Wulansari. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017*.

Gujarati, D. N., & Porter, D. . (2009). *Basic Econometrics* (5th Edition). McGraw Hill Inc.

Hausman, J. (1978). Specification Tests in Econometrics. *Econometrica*, *46*, 1251–1271. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1913827

Imam Sumardjoko. (2019). Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauandan Implikasinya terhadap Perubahan FundamentalEkonomi Regional. *Jurnal Defis*, *5*.

Khamdana, A. (2016). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMIDAERAH DI INDONESIA, 2008 – 2012. *Indonesian Treasury Review*, *1*(1), 23–38.

Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). *DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA*.

Musgrave, R. A. (1956). *The Theory of Public Finance.* McGraw-Hill.

Oates, W. (1972). *fiscal federalism*. harcourt brace jovanovisch.

Richard, & peggy. (1989). *PUBLIC FINANCE IN THEORY AND PRACTICE*.

Rita handayani. (2024). *Implikasi Dana ALokasi Umum, Dana Alokasi Khusus*

dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembanguan Manusia Pasca Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Vol. 5, Issue 1).

Romer, P. M. (1990). *Endogenous Technological Change*.

Rondinelli, D. A. D. G. S. C. (eds). (1983). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countris. *Sage Publication*.

Saragih, S. (2003). *desentralisasi fiskal di indonesia*. Gramedia.

Shah, A. (2007). *Performance accountability and combating corruption.* The World.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. In *Source: The Quarterly Journal of Economics* (Vol. 70, Issue 1).

Sulastri, E., & Efendri. (2021). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019). *Keywords in Qualitative Methods*, 1–12. http://info.trilogi.ac.id/repository/assets/uploads/AKT/b06ca-jurnal_evi-sulastri_17116021_final.pdf

Tambunan, T. T. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia* (. (ed.)). Ghalia Indonesia.

Tiebout, C. M. (1956). *A Pure Theory of Local Expenditure*. The University of Chicago Press.

Todaro, M. P. (2012). *Economic Development* (M. P. Todaro (ed.)). Pearson Education.

Trikurniasih, E., Handayani, R., Santoso, A., & Soleh, A. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *3*(2), 159. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.76

Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), 223. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043

LAMPIRAN

Data DAU Kabupaten Sumatera Utara Tahun 2019-2024

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
asahan	917.363	830.586	645.768	645.768	720.683	931.476
Batubara	628.895	565.927	430.049	430.049	473.312	608.903
dairi	629.145	575.549	398.359	39.835	531.582	650.948
deli serdang	1.513.584	1.376.847	1.222.369	1.222.369	1.391.943	1.707.252
Humbang Hasundutan	536.163	489.171	384.944	384.944	405.943	523.125
karo	758.968	687.569	517.759	517.759	587.581	741.308
labuhan batu	686.644	633.797	483.321	483.321	550.168	703.270
Labuhanbatu Selatan	541.104	496.576	327.983	327.983	383.982	528.309
Labuhanbatu Utara	522.907	479.785	375.358	375.358	405.912	522.121
langkat	1.229.427	1.099.658	835.168	835.168	996.027	1.278.300
mandailing natal	816.400	751.402	489.164	489.164	605.146	870.070
nias	443.235	417.880	255.800	255.800	317.255	442.579
Nias Barat	429.134	392.014	258.605	258.605	294.838	434.024
Nias Selatan	588.723	626.743	382.524	382.524	499.669	682.305
Nias Utara	611.629	560.374	423.785	423.785	466.072	609.666
Padang Lawas	554.953	521.528	372.789	372.789	406.414	549.928
Padang Lawas Utara	628.895	565.927	430.049	430.049	473.312	608.903
Pakpak Bharat	354.721	323.371	225.826	225.826	248.525	348.655
Samosir	465.249	418.883	312.873	312.873	369.358	444.290
Serdang Bedagai	798.240	727.436	555.061	555.061	621.048	857.654
simalungun	1.239.639	1.136.239	874.704	874.704	1.424	1.451.560
tapanuli selatan	676.183	604.693	403.145	403.145	449.882	686.582
tapanuli tengah	670.689	609.816	417.984	417.984	468.920	651.549
tapanuli utara	659.877	606.062	412.993	412.993	525.531	677.223
toba	548.690	519.088	385.004	385.004	462.735	572.130

Data DAK Kabupaten Sumatera Utara Tahun 2019-2024

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
asahan	233.204	228.340	202.063	365.811	8.842.714	18.258.616
Batubara	151.358	144.562	135.549	691.132	28.950.929	28.950.929
dairi	154.914	182.980	231.070	792.352	3.903.205	12.494.431
deli serdang	4.552.420	431.040	399.214	644.457	14.243.014	22.461.139
Humbang Hasundutan	142.133	159.895	147.243	9.150.489	6.865.777	2.772.023
karo	184.960	205.259	155.347	97.524	2.615.403	26.838.416
labuhan batu	199.352	197.293	140.490	67.647	46.457.165	15.570.103
Labuhanbatu Selatan	147.933	131.522	126.442	374.616	10.759.876	10.759.876
Labuhanbatu Utara	235.115	169.410	135.193	30.873	7.541.403	7.541.403
langkat	394.009	353.474	319.005	4.120.035	10.201.565	12.717.400
mandailing natal	248.799	301.779	212.031	15.356.659	12.887.696	29.144.162
nias	170.260	167.986	121.965	14.524.017	6.934.945	45.266.030
Nias Barat	207.417	194.289	131.079	262.945	2.264.355	88.728.662
Nias Selatan	199.651	258.903	327.268	14.285.590	12.680.221	42.619.439
Nias Utara	138.222	219.511	153.976	263.055	30.508.920	30.508.920
Padang Lawas	157.464	194.816	150.303	657.555	6.446.771	6.446.771
Padang Lawas Utara	138.216	186.769	149.124	444.539	8.687.722	8.687.722
Pakpak Bharat	71.532	96.835	58.949	9.150.489	6.865.777	1.429.199
Samosir	139.883	159.894	112.467	526.283	15.083.444	15.083.444
Serdang Bedagai	310.984	240.773	258.489	353.611	16.194.309	16.194.309
simalungun	364.957	359.478	338.320	4.732.398	39.354.703	48.894.150
tapanuli selatan	165.245	168.548	154.972	4.655.506	8.338.202	6.262.244
tapanuli tengah	241.018	178.925	218.264	15.529.974	6.668.806	6.304.549
tapanuli utara	191.102	217.540	177.818	14.930.517	7.912.400	5.660.603
toba	158.583	172.432	122.700	4.874.009	3.466.469	22.024.861

Data DBH Kabupaten Sumatera Utara Tahun 2019-2024

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
asahan	61.409.406	37.245.712	47.790.882	37.785.404	18.273.604	48.876.631
Batubara	35.686.660	6.352.376	19.909.683	13.859.067	10.120.480	18.273.604
dairi	18.605.275	33.583.641	14.399.164	6.664.738	8.513.744	8.251.055
deli serdang	69.836.369	47.374.864	54.910.415	46.410.710	9.498.198	57.126.151
Humbang Hasundutan	16.491.738	57.126.151	20.469.794	6.683.265	5.880.980	7.810.128
karo	18.907.019	48.876.631	20.411.406	10.511.733	7.931.896	10.159.156
labuhan batu	57.638.920	9.498.198	36.066.950	26.603.896	10.579.839	33.583.641
Labuhanbatu Selatan	76.140.103	18.273.604	43.969.727	28.750.019	15.642.224	7.931.896
Labuhanbatu Utara	45.209.524	17.244.179	28.374.147	16.954.304	16.846.713	9.498.198
langkat	17.317.705	8.251.055	13.384.396	74.222.254	14.208.953	10.315.271
mandailing natal	37.342.819	10.579.839	34.944.151	27.120.710	9.543.279	35.147.900
nias	1.440.205	7.641.338	18.808.420	6.732.610	4.753.287	6.863.035
Nias Barat	14.483.891	7.931.896	13.999.627	6.486.441	4.753.287	7.688.074
Nias Selatan	19.510.482	10.159.156	12.412.428	6.991.145	11.925.812	8.781.288
Nias Utara	15.110.809	8.513.744	22.912.394	6.649.982	11.173.596	6.930.756
Padang Lawas	29.069.238	10.579.839	18.959.473	12.800.190	14.804.342	8.513.744
Padang Lawas Utara	27.571.554	7.641.338	19.745.930	12.974.551	10.841.558	17.244.179
Pakpak Bharat	15.621.253	1.031.527	12.418.224	5.873.210	4.220.513	6.352.376
Samosir	15.582.321	8.781.288	23.709.933	6.194.522	2.939.447	7.641.338
Serdang Bedagai	53.553.472	7.810.128	19.964.474	22.977.740	10.548.725	10.579.839
simalungun	63.933.238	11.129.381	43.124.892	42.348.869	17.244.179	47.374.864
tapanuli selatan	15.176.412	18.273.604	10.830.868	24.712.872	11.780.293	56.186.113
tapanuli tengah	22.708.870	17.244.179	18.024.533	10.406.420	8.770.996	11.763.650
tapanuli utara	26.333.054	8.513.744	34.143.757	27.733.353	7.853.833	37.245.712
toba	20.321.770	7.931.896	16.752.965	7.419.437	7.641.338	11.129.381

Data Dana Desa Kabupaten Sumatera Utara Tahun 2019-2024

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
asahan	146.090	176.172	152.083	343.722	168.778	169.773
Batubara	118.843	204.142	121.071	138.267	131.874	132.176
dairi	127.172	137.853	129.738	76.876	131.686	132.189
deli serdang	306.386	310.216	312.546	177.353	339.139	343.908
Humbang Hasundutan	123.336	129.392	124.934	40.735	123.002	124.705
karo	197.078	177.353	198.409	137.853	197.014	198.789
labuhan batu	70.226	343.722	744.774	357.406	75.441	75.433
Labuhanbatu Selatan	61.548	230.195	67.788	60.553	58.057	59.203
Labuhanbatu Utara	79.123	59.203	86.022	91.308	87.414	87.244
langkat	205.446	409.163	213.259	310.216	236.620	239.691
mandailing natal	285.841	239.691	286.845	202.893	296.235	298.743
nias	180.585	343.908	179.544	148.358	143.305	146.553
Nias Barat	114	87.414	117.397	99.372	95.262	93.643
Nias Selatan	348.422	40.735	351.138	409.163	390.238	394.020
Nias Utara	137.008	58.057	136.386	115.561	111.172	108.038
Padang Lawas	230.097	291.776	230.275	238.368	227.794	230.195
Padang Lawas Utara	287.244	132.176	289.345	298.369	284.914	291.776
Pakpak Bharat	48.298	104.029	50.970	129.392	39.204	40.049
Samosir	108.744	40.049	107.929	104.029	98.627	100.353
Serdang Bedagai	184.774	100.353	185.739	211.052	201.500	204.142
simalungun	294.442	76.876	296.800	176.172	330.739	332.974
tapanuli selatan	167.751	394.020	169.754	166.869	158.866	161.260
tapanuli tengah	140.541	124.705	142.631	149.728	138.507	137.664
tapanuli utara	184.186	40.049	192.016	245	193.031	193.887
toba	176.101	100.353	177.074	204.616	169.156	172.017

Data IPM Kabupaten Sumatera Utara Tahun 2019-2024

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
asahan	69,92	70,29	70,49	71,13	71,56	74,17
Batubara	68,35	68,36	68,58	69,51	70,31	73,14
dairi	71,42	71,57	71,84	72,56	73,27	74,63
deli serdang	75,43	75,44	75,53	76,19	76,52	77,56
Humbang Hasundutan	68,83	68,87	69,41	70,32	70,75	73,33
karo	74,25	74,43	74,83	75,36	75,98	77,49
labuhan batu	71,94	72,01	72,09	72,92	73,69	75,2
Labuhanbatu Selatan	71,39	71,4	71,69	72,16	72,82	75,11
Labuhanbatu Utara	71,43	71,61	71,87	72,77	73,63	76,2
langkat	70,76	71	71,35	71,86	72,21	74,85
mandailing natal	66,52	66,79	67,19	68,05	68,56	73,44
nias	61,65	61,93	62,74	63,69	64,56	66,13
Nias Barat	61,14	61,51	61,99	62,93	63,7	65,66
Nias Selatan	61,59	61,89	62,35	63,17	64,12	65,87
Nias Utara	61,98	62,36	62,82	63,75	64,64	66,24
Padang Lawas	68,16	68,25	68,64	69,58	70,34	73,1
Padang Lawas Utara	69,29	69,85	70,11	70,93	71,63	74,16
Pakpak Bharat	67,47	67,59	67,94	68,85	69,58	73,09
Samosir	70,55	70,63	70,83	71,67	72,08	73,77
Serdang Bedagai	70,21	70,24	70,56	71,21	71,75	74,15
simalungun	72,98	73,25	73,4	73,77	74,29	75,88
tapanuli selatan	69,75	70,12	70,33	70,92	71,55	75,18
tapanuli tengah	68,86	69,23	69,61	70,31	70,91	73,34
tapanuli utara	73,33	73,47	73,76	74,14	74,65	77,48
toba	74,92	75,16	75,39	75,96	76,38	78,44

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Diva Andini Lubis

NPM : 2105180025

Tempat dan Tanggal Lahir : Sibolga , 25 Mei 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Data Pendidikan Formal

Tahun 2010-2015 : SD Negeri 081232 Sibolga

Tahun 2015-2017 : SMP Swasta AL Muslimin Pandan

Tahun 2017-2019 : SMAN 1 PLUS MATAULI PANDAN

Tahun 2021-2025 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara